

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2022

DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
KAWASAN KONSERVASI



DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Ringkasan Eksekutif.....	2
Pendahuluan	3
A. Latar Belakang	3
B. Kelembagaan	6
C. Sumber Daya	8
D. Sistematika Pelaporan.....	13
Perencanaan Kinerja	15
A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024.....	15
B. Target Renstra Tahun 2020-2024.....	19
Akuntabilitas Kinerja	30
Capaian Kinerja Organisasi.....	30
Realisasi Anggaran	75
Penutup	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penyebaran Pegawai Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2022	8
Tabel 2. Keadaan Pegawai Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Berdasarkan Golongan Tahun 2021	11
Tabel 3. Nilai Aset TA. 2021 dan TA.2022	12
Tabel 4. Keterkaitan Sasaran Program Ditjen KSDAE dengan Sasaran Kegiatan dan IKK Bidang PJLKK	20
Tabel 5. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024.....	20
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Antara Direktur PJLKK dengan Direktur Jenderal KSDAE.....	24
Tabel 7. Komponen dan Sub Komponen Kegiatan Pendukung Dalam Rangka Pencapaian IKK Direktorat PJLKK Tahun 2022	25
Tabel 8. Capaian Kinerja Direktorat PJLKK Tahun 2022	31
Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas Minimal Sebanyak 15 Destinasi Selama 5 Tahun	32
Tabel 10. Data Capaian IKK 1.	33
Tabel 11. Izin PB-PJWA 2022	35
Tabel 12. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Tahun 2022.....	37
Tabel 13. Lokasi Penetapan Desain Tapak Pada Tahun 2022	41
Tabel 14. Hasil Evauasi Kinerja PB-PSWA Tahun 2022	42
Tabel 15. Arahan Kebijakan dan Dasar Regulasi/ Teknis Implementasi	45
Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi dan Karbon (entitas) Unit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi	50
Tabel 17. Jumlah IPJLPB yang Terbit Sampai Tahun 2022.....	53
Tabel 18. Capaian indikator kinerja tahun 2022 pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam untuk komponen pemanfaatan jasa lingkungan karbon	55
Tabel 19. Perbandingan Kenaikan/Penurunan komponen pemanfaatan jasa lingkungan karbon	55
Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja "Jumlah entitas pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Sebanyak 60 Izin selama 5 tahun" tahun 2022	60
Tabel 21. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) Tahun 2022	61
Tabel 22. Capaian indikator kinerja tahun 2022 Jumlah destinasi wisata alam SAVE minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun	66
Tabel 23. Parameter Capaian IKK "Jumlah destinasi wisata alam SAVE minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun" pada tahun 2022	67

Tabel 24. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Tahun 2022	69
Tabel 25. Capaian indikator kinerja tahun 2022 Jumlah destinasi wisata alam Bahari minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun	71
Tabel 26. Parameter Capaian IKK “Jumlah destinasi wisata alam Bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun” pada tahun 2022	72
Tabel 27. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Tahun 2022.....	72
Tabel 28. Realisasi PNBP pada Jasa Lingkungan Tahun 2020 – 2022.....	74
Tabel 29. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Direktorat PJLKK Tahun 2018-2022.	76
Tabel 30. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Per-kegiatan Direktorat PJLKK Tahun 2022.	77
Tabel 31. Realisasi Anggaran UPT target capaian bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	8
Gambar 2. Grafik Penyebaran Pegawai pada Direktorat PJLKK Tahun 2022	9
Gambar 3. Keadaan Pegawai Direktorat PJLKK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 202	10
Gambar 4. Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Gambar 5. Keadaan Pegawai Direktorat PJLKK Berdasarkan Golongan Tahun 2022	11
Gambar 6. Keterkaitan IKU KLHK 2020-2024, IKP Ditjen KSDAE 2020-2024 dan IKK Direktorat PJLKK 2020-2024	19
Gambar 7. Izin PB-PJWA 2021-2022	34
Gambar 8. Izin PB-PJWA Tahun 2022	35
Gambar 9. Investasi PB-PSWA	45
Gambar 10. Pembangunan checkpoint	47
Gambar 11. Fasilitas kuliner Joben, TN rinjani jalur pendakian Torean, TN rinjani	47
Gambar 12. Penggeraan tracking Kalkun, TNGM	47
Gambar 13. Evaluasi kinerja PB PSWA PT Joben	47
Gambar 14. Evaluasi PB-PSWA PT. Joben Evergreen di TN Gunung Rinjani	47
Gambar 15. Evaluasi PB-PSWA PT. Mitra Alam di TWA Tanjung Tampa, BKSDA NTB	48
Gambar 16. Bimbingan Teknis PB-PJWA di BBTN Bukit Barisan Selatan dan TN Karimunjawa	48
Gambar 17. Rapat Pembahasan Desain Tapak TN Gunung Merapi	48
Gambar 18. Rapat Pembahasan Rapermen Tematik Bidang PJLKK	49
Gambar 19. Workshop Peningkatan Promosi dan Pemasaran Wisata Alam di Pontianak, Kalimantan	49
Gambar 20. Pembahasan Dokumen RKT-PJLPB Star Energy Geothermal Darajat II, Limited	54
Gambar 21. Kegiatan Supervisi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Tahura R. Soerjo	54
Gambar 22. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Konservasi	54
Gambar 23. Perbandingan capaian komulatif indikator kinerja komponen pemanfaatan jasa lingkungan karbon tahun 2022 dibandingkan tahun 2020	56
Gambar 24. Jumlah capaian indikator kinerja komponen pemanfaatan jasa lingkungan karbon tahun 2020 s.d 2022	56
Gambar 25. Pengambilan data stok karbon di TN Gunung Ciremai	59
Gambar 26. Kegiatan Bimtek Jasling Air di TN Bromo Tengger Semeru	63

Gambar 27. Kegiatan Bimtek Jasling Air di BKSDA Bengkulu	64
Gambar 28. Kegiatan Bimtek Jasling Air di TN Sulawesi Utara dan Penelaahan Usulan PAPA	64
Gambar 29. Kegiatan Penyusunan NSPK Permen Tematik dan PNBP Jasa Lingkungan pada Kawasan Konservasi	64
Gambar 30. Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi dengan DPRD Provinsi Bengkulu dan PERPAMSI	65
Gambar 31. Kegiatan Pengawasan Dan Evaluasi Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) PT Brantas Cakrawala Energi di BBTN Kerinci Seblat	65
Gambar 32. Pembangunan Kios Usaha Masyarakat Di Rantau Sialang TN Gunung Leuser dan Pembangunan Tower Savana Bekol, di TN Baluran	70
Gambar 33. Evaluasi Kinerja PB-PSWA di PT. Komodo Wildlife Ecotourism	70
Gambar 34. Pembangunan Pondok Kerja Isenebuai di TN teluk Cenderawasih	73
Gambar 35. Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat PJLKK Tahun 2018-2022.	76

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja (LKJ) Tahun 2022 telah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (PJLKK).

Direktorat PJLKK yang merupakan unsur pelaksana teknis sebagai pembuat kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 15/MENLHK-II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengamanatkan bahwa Direktorat PJLKK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.

Laporan kinerja ini menjadi laporan capaian tahun ke-3 dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sesuai dengan perjanjian kinerja antara Direktur PJLKK dengan Direktur Jenderal KSDAE pada Tahun 2022 indikator capaian masih sebanyak 4 IKK namun pengukuran sudah terbagi menjadi 5 IKK yang terdiri dari: (1) Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas sebanyak 15 Destinasi, (2) Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon sebanyak 40 entitas, (3) Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 60 entitas, (4) Jumlah destinasi wisata alam SAVE (*Science, Academic, Voluntary, Education*) sebanyak 7 destinasi berubah menjadi 52 destinasi, dan (5) Jumlah destinasi wisata alam bahari sebanyak 3 destinasi berubah menjadi 7 destinasi. Tentuya capaian kinerja ini tidak lepas dari usaha dan kontribusi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pelaksana di tingkat tapak. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan hasil realisasi dengan target yang diharapkan.

Akhir kata, semoga LKJ Direktorat PJLKK Tahun 2022 dapat sesuai dan memenuhi harapan yang diinginkan bersama.

Bogor, Januari 2023

Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Kawasan Konservasi,



Dr. Nardang Prhadi, S.Hut, M.Sc

NIP. 19691204 199503 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi telah menyusun Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas. Salah satu fondasi penting dalam manajemen kinerja yang akuntabel adalah adanya pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan pengingkatan akuntabilitas dengan melakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terrealisasi dengan target kinerja yang ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PJLKK telah tetuang di dalam Renstra 2020 – 2024.

Target kinerja Direktorat PJLKK juga merupakan bagian dari program Direktorat Jenderal KSDAE yaitu “Pengelolaan Hutan Berkelanjutan”, dengan sasaran program yaitu meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan TSL secara lestari. Untuk mendukung sasaran program KSDAE, Direktorat PJLKK telah menetapkan target kinerja selama 5 tahun (2020-2024) dan target kinerja tahun 2022 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Direktorat PJLKK dengan Ditjen KSDAE, sebagai berikut:

1. Jumlah Destinasi wisata alam priorita minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 Tahun dengan target Tahun 2022 sebanyak 15 destinasi,
2. Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon sebanyak 40 entitas selama 5 Tahun dengan target Tahun 2022 sebanyak 9 entitas,
3. Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 60 entitas selama 5 Tahun dengan target Tahun 2022 sebanyak 10 entitas,
4. Jumlah Destinasi wisata alam *Sciense, Academic, Voluntary, Education* (SAVE) sebanyak 52 destinasi dengan target Tahun 2022 sebanyak 7 destinasi,
5. Jumlah destinasi wisata alam bahari sebanyak 7 destinasi dengan target Tahun 2022 sebanyak 3 destinasi.

Pengukuran kinerja diukur dengan pembatasan nilai maksimal sebesar 150% dan nilai minimal 0. Secara keseluruhan IKK Direktorat PJLKK telah mencapai target namun terdapat 1 IKK yang belum memenuhi target.

1. Capaian kinerja Tahun 2022 pada IKK 1: Jumlah Destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 Tahun dengan target Tahun 2022 sebanyak 15 destinasi sebesar 100%, namun pada IKK 1 pengembangan destinasi akan terus dilakukan hingga Tahun 2024 pada lokasi yg ditetapkan.
2. Capaian kinerja Tahun 2022 pada IKK 2: Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon sebanyak 40 entitas selama 5 Tahun dengan target Tahun 2022 sebanyak 9 entitas sebesar 89% atau hanya tercapai 8 entitas, hal ini dikarenakan adanya *Automatic Ajustment* (AA) pada anggaran yang teralokasi di lokasi target jasling karbon.
3. Capaian kinerja Tahun 2022 pada IKK 3: Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 60 entitas selama 5 Tahun dengan target Tahun 2022 sebanyak 10 entitas sebesar 110% atau telah tercapai 11 entitas. Capaian yang terakumulasi antara IKK 2 dan IKK 3 mencapai 85 entitas atau sebesar 85%.

4. Capaian kinerja Tahun 2022 pada IKK 4: Jumlah Destinasi wisata alam *Sciense, Academic, Voluntary, Education (SAVE)* sebanyak 52 destinasi dengan target Tahun 2022 sebanyak 7 destinasi sebesar 100%, namun pada IKK 4 pengembangan destinasi akan terus dilakukan hingga Tahun 2024 pada 7 lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan 45 lokasi target yang akan dimulai pada Tahun 2023-2024.
5. Capaian kinerja Tahun 2022 pada IKK 5: Jumlah Destinasi wisata alam bahari sebanyak 7 destinasi dengan target Tahun 2022 sebanyak 3 destinasi sebesar 100%, namun pada IKK 5 pengembangan destinasi akan terus dilakukan hingga Tahun 2024 pada lokasi 3 lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan 4 lokasi target yang akan dimulai pada Tahun 2023-2024.

Dalam capaian kinerja Tahun 2022 Direktorat PJLKK didukung dengan anggaran di pusat sebesar Rp 6.650.091.000 dan anggaran di UPT target sebesar Rp 52.615.269.000 dengan realisasi pusat sebesar Rp 6.639.254.715 atau sebesar 99,84%, dan realisasi di UPT sebesar Rp 51.942.951.710 atau sebesar 98,72%.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (PJLKK) sebagai salah satu Direktorat Teknis dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAE) yang memiliki tanggung jawab menyelenggarakan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 15/MENLHK-II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengamanatkan bahwa Direktorat PJLKK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PJLKK dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundungan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasar amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, PeLaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja wajib disusun dan disampaikan untuk melaporkan kinerja sebagaimana tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam penyusunan LKj Tahun 2022, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (PJLKK) sebagai salah satu Direktorat Teknis Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : P.15/KSDAE-SET/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Adapun tujuan disusunnya LKj adalah untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Permasalahan Utama yang Dihadapi (*Strategic Issues*) :

1. Pandemi Covid-19

Optimalisasi kinerja selama memasuki masa penyesuaian Pandemi Covid-19 yang dimulai pada pertengahan Tahun 2022 dilaksanakan secara tatap muka serta penggunaan teknologi informasi, diantaranya adalah dengan menyewa platform yang memungkinkan pelaksanaan rapat dilaksanakan secara virtual. Platform tersebut adalah ZoomUs. Direktorat PJLKK membeli Akun *zoom pro adds on large meeting*. Akun tersebut dapat menampung 500 orang dalam sekali pertemuan. Selain dipergunakan untuk rapat, akun banyak digunakan untuk pelaksanaan seminar/workshop daring (*webinar*) serta pelaksanaan Virtual Tour.

Demi pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan kerja dilaksanakan dengan mewajibkan pegawai untuk melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Melalui re-focusing anggaran, pelaksanaan protokol kesehatan didukung dengan penyediaan hand sanitizer, sabun cuci tangan dan pemberian masker.

2. Reorganisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MenLHK-II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan tindak lanjut Perpres No. 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209). Reorganisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi serta tindak lanjut penyederhanaan birokrasi. Perubahan dalam Permen LHK Nomor 15/MenLHK-II/2021 salah satunya yaitu perubahan nama Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (P JLKK) menjadi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (P JLKK).

Tugas dan Fungsi diatur dalam pasal 168 dan 169 sebagai berikut :

Tugas Direktorat PJLKK melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.

Fungsi Direktorat PJLKK :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air, panas bumi, karbon dan jasa lingkungan

- lainnya pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air, panas bumi, karbon dan jasa lingkungan lainnya pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air, panas bumi, karbon dan jasa lingkungan lainnya pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
 - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air, panas bumi, karbon dan jasa lingkungan lainnya pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air, panas bumi, karbon dan jasa lingkungan lainnya pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air, panas bumi, karbon dan jasa lingkungan lainnya pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Memperhatikan pasal 170 Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi;
- b. Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air, Panas Bumi dan Karbon pada Kawasan Konservasi;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Presidensi G20

Presidensi G20 Tahun 2022 telah dilaksanakan pada Bulan November 2022 di Nusa Dua, Bali, dimana pertemuan ini menjadi forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). Kontribusi yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PJLKK untuk mendukung dan memeriahkan G20 di Bali adalah salah satunya pelaksanaan Hari Konservasi Alam Nasional Tahun 2022 pada tanggal 30 Agustus s/d 3 September 2022 yang dipusatkan pelaksanaannya di Taman Nasional Bali Barat, dukungan pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memeriahkan dan menyambut pelaksanaan G20 dengan berbagai kegiatan sosial, peningkatan ekonomi lokal dan edukasi masyarakat seperti pelepasliaran satwa, penanaman mangrove, pameran konservasi alam dan kesenian rakyat.

4. Automatic Ajustment (AA)

Automatic Ajustment (AA) Anggaran dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan penanganan alokasi belanja berbasis masyarakat. Direktorat PJLKK melaksanakan Automatic Ajustment (AA) anggaran dalam 2 tahap. Tahap pertama pada bulan Januari 2022 dan tahap kedua di Bulan Mei dengan besaran pencadangan (AA) sebesar Rp 216.200.000, sehingga total anggaran Direktorat PJLKK sebesar Rp 5.930.256.000 ditambahkan dengan Pagu anggaran HLN FIP-1 sebesar Rp 399.000.000 total menjadi Rp 6.329.256.000. Namun, terdapat beberapa kali refocusing anggaran sehingga besaran anggaran terus berkurang, dan pada bulan Oktober 2022 terjadi kenaikan anggaran karena adanya Top Up Anggaran HLN FIP-1 sebesar Rp 700.000.000 sehingga total Pagu anggaran terakhir Direktorat PJLKK menjadi Rp 6.650.091.000.

B. Kelembagaan

1. Kedudukan

Direktorat PJLKK adalah unsur pelaksanaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ditjen KSDAE yang dipimpin oleh Direktur.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 15/MENLHK-II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Memperhatikan pasal 168, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (P JLKK) yang berada dibawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE).

Direktorat PJLKK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (P JLKK) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air, panas bumi, karbon, dan jasa lingkungan lainnya pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air, panas bumi, karbon, dan jasa lingkungan lainnya pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air, panas bumi, karbon, dan jasa lingkungan lainnya pada kawasan cagar alam, suaka

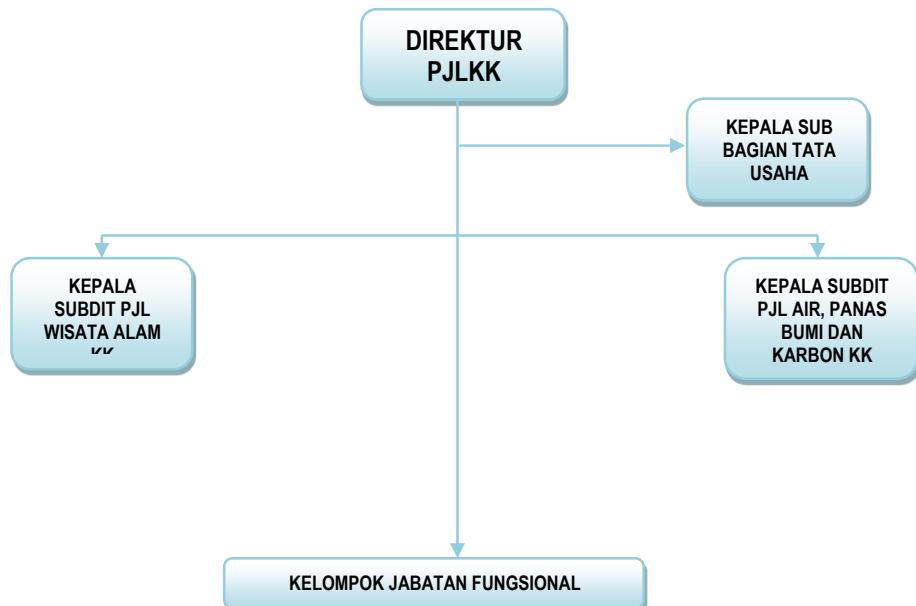
- margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air, panas bumi, karbon, dan jasa lingkungan lainnya pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air, panas bumi, karbon, dan jasa lingkungan lainnya pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air, panas bumi, karbon, dan jasa lingkungan lainnya pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru;
 - g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dibantu oleh :

- a. Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air, Panas Bumi dan karbon pada Kawasan Konservasi; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan air, panas bumi, karbon, dan jasa lingkungan lainnya pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru;
- b. Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air, Panas Bumi dan karbon pada Kawasan Konservasi; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru;
- c. Sub Bagian Tata Usaha; mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat PJLKK.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 15/MENLHK-II/2021 dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.

C. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sehubungan dengan perubahan organisasi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, maka berdampak terhadap berkurangnya jumlah pegawai Direktorat PJLKK. Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai kinerja, pada tahun 2022 Direktorat PJLKK didukung pegawai sebanyak 65 orang terdiri dari 52 orang PNS dan 13 orang PPNPN dengan penyebaran pegawai sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Penyebaran Pegawai Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2022.

Jabatan	Direktur	Subdit PJL Air, PBK KK	Subdit PJLWA KK	SBTU	Total
Eselon II	1	-	-	-	1
Eselon III	-	1	1	-	2
Eselon IV	-	-	-	1	1
Non Struktural	-	6	12	13	31

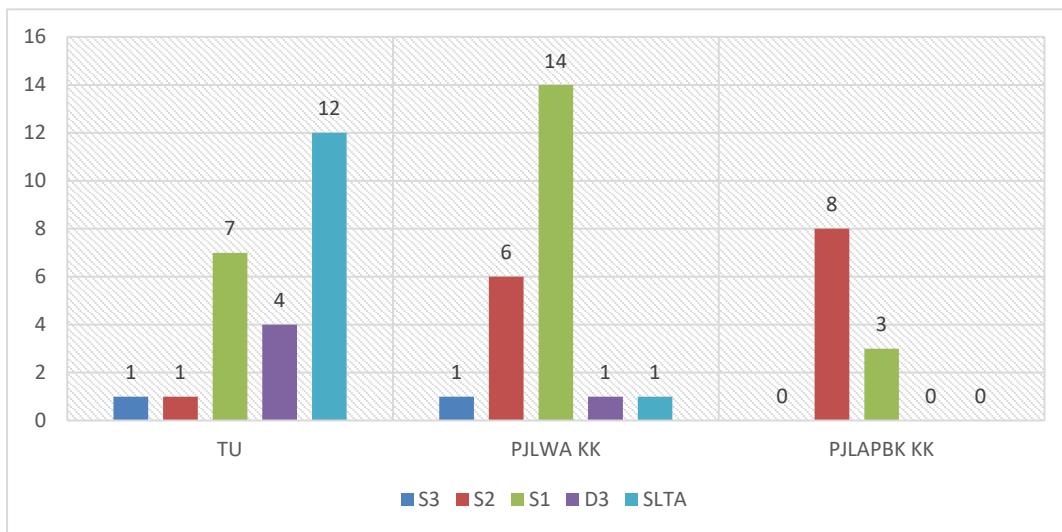
Fungsional	-	6	6	1	14
PPNPN	-	-	4	9	13
Jumlah	1	13	23	24	62

Memperhatikan tabel 1, penyebaran pegawai pada Direktorat PJLKK relatif merata untuk setiap bagian dimana penempatan pegawai dengan mempertimbangkan beban tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian untuk mencapai target kinerja. Persentase penyebaran pegawai Direktorat PJLKK dapat terlihat pada gambar 2.

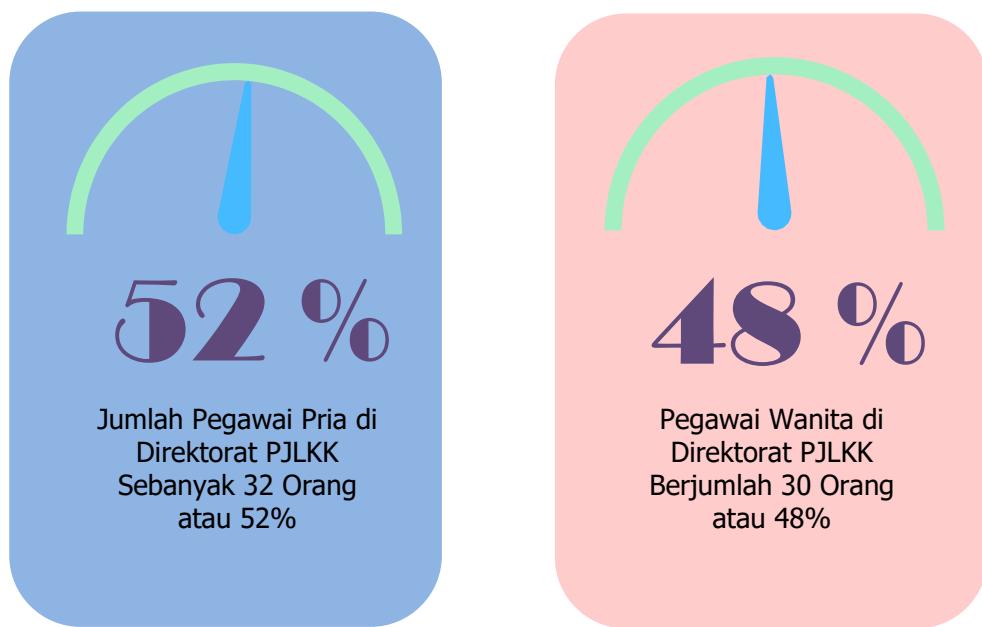


Gambar 2. Grafik Penyebaran Pegawai pada Direktorat PJLKK Tahun 2022.

Berdasarkan pendidikan, pegawai Direktorat PJLKK dapat diklasifikasikan sebagai berikut 2 orang S-3, 17 orang S-2, 25 orang S-1, 5 orang D-3, dan 13 orang SLTA. Secara lebih jelas keadaan pegawai Direktorat PJLKK berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Keadaan Pegawai Direktorat PJLKK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022.



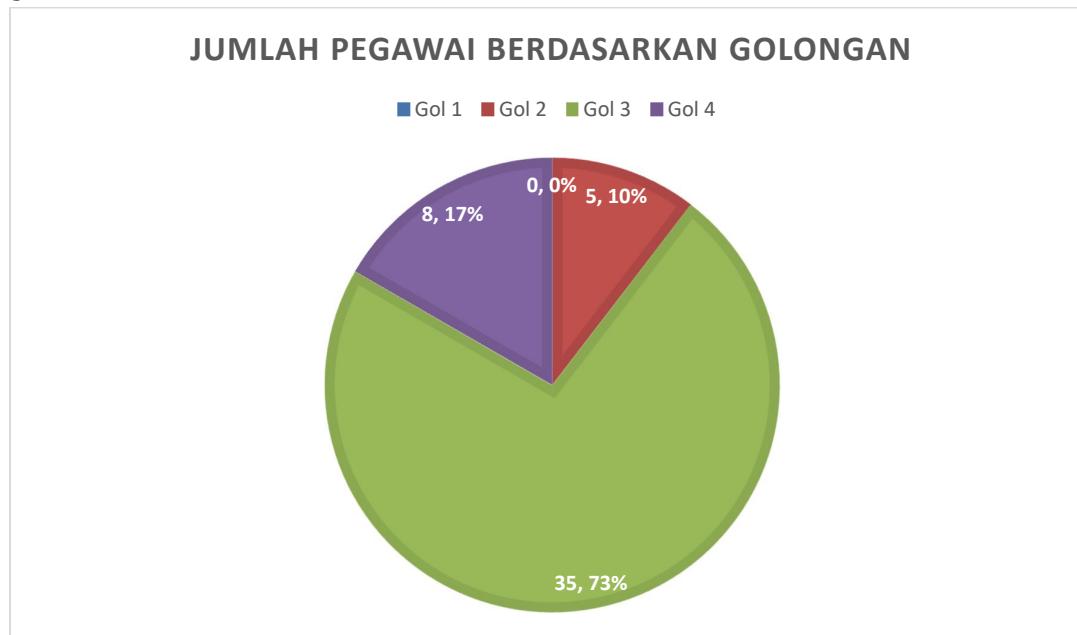
Gambar 4. Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan golongan/ pangkat pegawai Direktorat PJLKK dirinci sebagai berikut : golongan II: 3 orang, golongan III: 46 orang, dan golongan IV: 6 orang, secara rinci disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Keadaan Pegawai Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Berdasarkan Golongan Tahun 2021.

Golongan/ Ruang	Direktur	Subdit PJL Air PBK KK	Subdit PJL PWA KK	SBTU	Total
Golongan I	-	-	-	-	-
Golongan II	-	-	-	5	5
Golongan III	-	11	15	10	35
Golongan IV	1	2	5	-	8
Jumlah	1	3	20	15	48

Sebagian besar pegawai Direktorat PJLKK adalah golongan III sebanyak 35 Orang. Perbandingan pegawai Direktorat PJLKK berdasarkan golongan dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Keadaan Pegawai Direktorat PJLKK Berdasarkan Golongan Tahun 2022.

2. Sarana Prasarana

Aset atau Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Direktorat PJLKK per 31 Desember 2022 dalam rangka pemanfaatan jasa lingkungan setelah mengalami penyusutan sebesar Rp 1.922.795.508. Penyusutan nilai merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara lebih rinci aset

Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2022 sebelum dilakukan E- Rekonsiliasi tahunan dengan Eselon I terdiri atas :

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun, yaitu berupa kas, piutang dan persediaan. Nilai aset lancar Direktorat PJLKK per 31 Desember 2022 Rp 111.377.210.

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari anggaran yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBN melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi. Aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan kantor, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.928.097.633.

c. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam asset lancar, asset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya antara lain TP/TGR, aset tak berwujud, aset lain-lain dan aset yang dibatasi penggunaannya. Nilai aset lainnya pada Direktorat PJLKK per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 5.302.125.

Nilai aset pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Aset TA. 2021 dan TA.2022

No	Jenis Aset	Jumlah	
		Tahun 2021	Tahun 2022
1	Aset Lancar		
	Kas di Bendahara Pengeluaran		
	Persediaan	258.019.023	111.377.210
	Jumlah Aset Lancar		
2	Aset Tetap		
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Peralatan dan Mesin	7.940.870.957	8.064.712.707
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	116.050.000	116.050.000
3	Aset Tetap Lainnya	90.907.000	190.907.000
	Aset Tetap Renovasi	28.050.000	189.019.680
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.430.001.052)	(6.632.591.754)
	Jumlah Aset Tetap	1.745.876.905	1.928.097.633
4	Aset Lainnya		
	Aset Tak Berwujud (Software)	304.716.400	304.716.400
	Akumulasi Penyusutan Software	(292.258.900)	(304.716.400)
	Aset yg tidak digunakan untuk operasional pemerintah	364.560.400	364.560.400
	Akumulasi penyusutan Aset yg tidak digunakan untuk operasional pemerintah	(357.490.900)	(359.258.275)
	Jumlah Aset Lainnya	19.527.000	5.302.125
	Jumlah Aset	1.765.403.905	1.922.795.508

D. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 Direktorat PJLKK disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja intansi pemerintah dan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : P.8/KSDAE-SET/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, dengan outline sebagai berikut :

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum Direktur PJLKK.

RINGKASAN EKSEKUTIF, merupakan gambaran singkat terhadap isi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 Direktorat PJLKK.

- BAB I. PENDAHULUAN, Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi (Pandemi COVID-19, reorganisasi KLHK, aAoutomatic Ajustment anggaran I - IV).
- BAB II. PERENCANAAN KINERJA, memuat Rencana Strategis (visi, misi, tujuan, sasaran, program, Indikator Kinerja Kegiatan, target tahunan, target jangka menengah), Rencana Kerja (komponen kegiatan, target output/kinerja dan target anggaran) dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022.
- BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis 2021-2024.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
8. Analisis capaian kinerja disusun tidak hanya pada tingkatan output, melainkan juga menyajikan hasil kinerja pada tingkatan hasil (outcome) dari masingmasing unit kerja. Sebagai acuan penyajian data data outcome, mohon untuk mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.21/SETJEN/ROCAN/SET I/9/2019 tentang Pedoman Transformasi Evaluasi Kinerja Kementerian.
9. Dalam menyajikan laporan kinerja lebih mengutamakan penggunaan grafis dengan narasi yang singkat dan padat.
10. Narasi yang disampaikan menggambarkan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, optimis, menginspirasi, humanis dan story telling.
11. Foto-foto yang disampaikan menggambarkan keceriaan dan antusias masyarakat atau kepolosan anak terhadap outcome yang diharapkan, bukan seremonial yang memberikan kesan adanya jarak antara pemerintah dan masyarakat.
12. Penghargaan atas prestasi kinerja yang diraih/diinisiasi oleh masing-masing unit kerja dapat disajikan sebagai bentuk afirmasi keberhasilan dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. (Opsiional).
13. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil kegiatan bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- BAB IV. PENUTUP, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan oleh organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, berisikan perjanjian kinerja dan data dukung lainnya yang menunjang pencapaian realisasi kinerja.

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024

Berdasarkan dinamika kebijakan nasional, visi dan misi hanya berada pada level Presiden/Nasional. Selanjutnya visi dan misi tersebut dijabarkan pada tingkat di bawahnya. Penjabaran tersebut pada tingkat Kementerian, tingkat Ditjen/Setjen/Itjen, tingkat Direktorat/Biro/Balai Besar, tingkat Sub Direktorat dan Balai, tingkat Seksi/Sub Bagian berturut-turut masing-masing berupa sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, sasaran unit kegiatan dan sasaran elemen kegiatan.

Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahap penting dari RPJPN 2005-2025, telah mengaruskutamakan *Sustainable Development Goals (SDGs)* beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan nasional ke depan, yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- 7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025, Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 sebagai berikut :

VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2020-2024

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; serta
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah Misi ke-4 yaitu: "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan".

Dengan pedoman dan rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi KLHK yaitu: "**Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat**". Pada visi KLHK di atas, terdapat 2 (dua) kata kunci, yaitu **keberlanjutan** dan **kesejahteraan**. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

- 1) **Keberlanjutan**, pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- 2) **Kesejahteraan**, tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

TUJUAN PEMBANGUNAN KLHK TAHUN 2020-2024

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
- 2) Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
- 3) Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan.
- 4) Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

SASARAN STRATEGIS KLHK TAHUN 2020-2024

- 1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim
- 2) Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tamping lingkungan
- 3) Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
- 4) Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

Mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KLHK, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) menetapkan program, sasaran program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Program KSDAE

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Sasaran Program KSDAE

1. Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Meningkatnya ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
3. Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara lestari;
4. Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi;
5. Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi;
6. Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup Ditjen KSDAE

Kegiatan KSDAE

- 1. Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi;**
- 2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi;**
- 3. Kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik;**
- 4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi;**
- 5. Kegiatan Bina Pemulihan Pengelolaan Ekosistem;**
- 6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.**

Untuk melaksanakan sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat PJLKK menetapkan Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut :

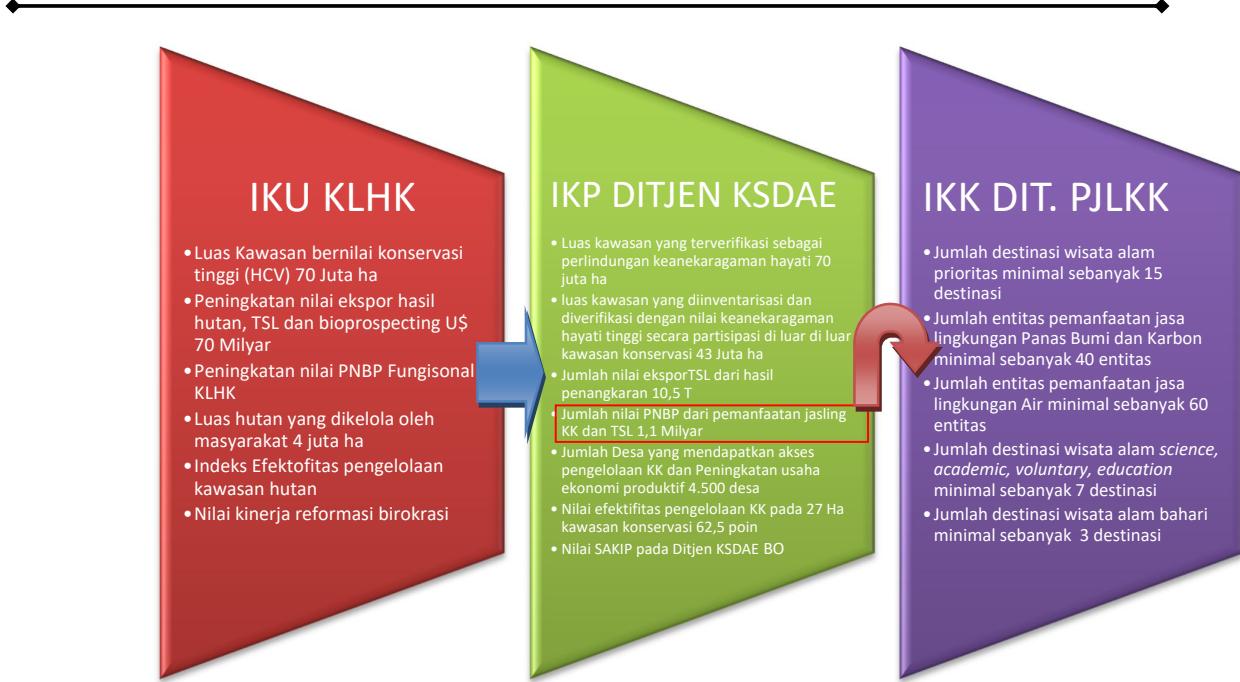
Sasaran Kegiatan PJLKK :

Terjaminnya Efektivitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Serta Kolaborasi Pengelolaan Kawasan

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dan mendukung program KSDAE, Direktorat PJLKK bertanggungjawab dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu:

- 1) Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun.
- 2) Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi dan Karbon minimal sebanyak 40 entitas selama 5 tahun.
- 3) Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan Air minimal sebanyak 60 entitas selama 5 tahun.
- 4) Jumlah destinasi wisata alam *science, academic, voluntary, education* minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun.
- 5) Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PJLKK Tahun 2020-2024 adalah penjabaran dari Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal KSDAE “Jumlah nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan tumbuhan satwa liar sebesar 1,1 Miliar”, yang merupakan penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian LHK ketiga yaitu “Peningkatan nilai PNBP fungsional KLHK”.



Gambar 6. Keterkaitan IKU KLHK 2020-2024, IKP Ditjen KSDAE 2020-2024 dan IKK Direktorat PJLKK 2020-2024

B. Target Renstra Tahun 2020-2024

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi periode 2020-2024, ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari Program Direktorat Jenderal KSDAE yang menjadi tanggung jawab Direktorat PJLKK dalam Renstra adalah :

- 1) Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun.
- 2) Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi dan Karbon minimal sebanyak 40 entitas selama 5 tahun.
- 3) Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan Air minimal sebanyak 60 entitas selama 5 tahun.
- 4) Jumlah destinasi wisata alam *science, academic, voluntary, education* minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun.
- 5) Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun.

Keterkaitan Sasaran Program Ditjen KSDAE dengan Sasaran Kegiatan dan IKK Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dapat terlihat pada tabel 4.

Tabel 4. Keterkaitan Sasaran Program Ditjen KSDAE dengan Sasaran Kegiatan dan IKK Bidang PJLKK.

No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL Secara Lestari	Terjaminnya Efektivitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi serta Kolaborasi Pengelolaan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi dan Karbon minimal sebanyak 40 entitas selama 5 tahun Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan Air minimal sebanyak 60 entitas selama 5 tahun Jumlah destinasi wisata alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun Jumlah wisata alam bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi tahun 2020-2024 diuraikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terjaminnya efektivitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan	Jumlah destinasi wisata alam prioritas (Destinasi)	15	15	15	15	15
		Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan Panas bumi dan Karbon (Entitas)	4	12	9	10	40
		Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan Air (Entitas)	15	15	10	10	60
		Jumlah destinasi wisata alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> (Destinasi)	7	7	7	52	52
		Jumlah destinasi wisata alam bahari (Destinasi)	3	3	3	7	7

Target capaian masing-masing IKK tidak bisa terpisahkan dari Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal KSDAE yaitu Balai Besar/ Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BB/B KSDA) dan Balai Besar/ Balai Taman Nasional (BB/B TN). Strategi capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PJLKK sebagai berikut :

1. Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun
 - 1) Penyiapan/prakondisi kawasan konservasi seperti zonasi/bloking, Rencana Pengelolaan, Desain Tapak, daya dukung daya tampung kawasan dan

-
- pengunjung, masterplan wisata alam, rencana pemberdayaan masyarakat, rencana pemulihian ekosistem dan dokumen perencanaan lain.
- 2) Pembangunan infrastruktur dan pengembangan produk seperti pengembangan aktivitas wisata, penerapan 5 A (*Attraction, Activity, Amenity, Accommodation, Accessibility*), pembangunan infrastruktur dan sarpras, manajemen pengunjung, manajemen sampah, inovasi dan diversifikasi produk, izin dan kerjasama dengan para pihak
 - 3) Meningkatkan efektifitas promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan melalui:
 - a. Membuat materi promosi yang terpadu bersama Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta K/L lainnya.
 - b. Mengoptimalkan penggunaan IT untuk promosi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi melalui aplikasi yang berbasis android, IOS maupun melalui mobile web
 - c. Melaksanakan pameran dan edukasi publik dalam even-even yang tepat baik secara *daring* maupun *luring*.
 - d. Mengoptimalkan media sosial, media cetak dan elektronik, diantaranya dengan merekrutkan *public figure* sebagai *influencer*.
 - e. Menyelenggarakan *talkshow* sebagai sosialisasi dan penyadartahuan mengenai Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi.
 - f. Melaksanakan pengembangan kegiatan pemasaran jasa lingkungan hutan konservasi dalam bentuk workshop *buyer meet seller* maupun *business to business*.
 - 4) Membangun kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga atau institusi lain dalam rangka pencapaian target jumlah kunjungan dan peningkatan kualitas kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke kawasan konservasi, diantaranya dengan membentuk dan mengefektifkan sekretariat bersama, melakukan kampanye dan penerapan program *zero waste* dan *zero accident*
 - 5) Membangun database pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam berbasis spasial yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan.
 - 6) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wisata alam dengan pembentukan dan pembinaan pemandu wisata.
 - 7) Mendorong pembangunan wisata alam dengan daya tampung dan daya dukung kawasan TN/TWA.
2. Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon minimal sebanyak 40 entitas selama 5 tahun.
- a. **Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi**
 - 1) Pemutakhiran database potensi panas bumi di hutan konservasi berbasis spasial dan non spasial.
 - 2) Penyusunan dan/atau revisi NSPK bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di hutan konservasi.
 - 3) Meningkatkan sosialisasi potensi panas bumi dan NSPK bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di hutan konservasi kepada UPT/UPTD.

-
- 4) Meningkatkan sosialisasi NSPK bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di hutan konservasi kepada pihak terkait.
 - 5) Meningkatkan sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di hutan konservasi.
 - 6) Monitoring dan evaluasi terhadap pemegang izin.

b. Pemanfaatan jasa lingkungan karbon

- 1) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pihak terkait mengenai pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan hutan konservasi.
- 2) Melakukan pembinaan teknis bidang pemanfaatan jasa lingkungan karbon kawasan hutan konservasi ke UPT dan mitra terkait sehingga menjadi media sosialisasi dan *update* informasi Pemanfaatan jasa lingkungan karbon di pusat dan di tingkat tapak.
- 3) Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik tingkat pusat ataupun satker di daerah terkait pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan konservasi melalui *Inhouse Training* dan simulasi integrasi jasa lingkungan ke dalam karbon hutan di taman nasional sehingga setiap UPT dapat melakukan penghitungan nilai kualitas stok karbon berdasarkan eksositem di taman nasional masing-masing.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pemanfaatan jasa lingkungan karbon.
- 5) Melaksanakan dukungan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan karbon di hutan konservasi.
- 6) Melaksanakan fasilitasi pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan hutan konservasi.

Menyiapkan regulasi dan acuan normatif terkait pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan hutan konservasi, salah satunya terkait sistem pendanaan permanen konservasi berbasis pemanfaatan jasa lingkungan karbon, melalui penyusunan naskah akademik dan konsultasi publik sistem pendanaan permanen konservasi berbasis pemanfaatan jasa lingkungan karbon.

3. Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan air minimal sebanyak 60 entitas selama 5 tahun.

c. Pemanfaatan jasa lingkungan air

- 1) Penyempurnaan peraturan terkait pemanfaatan air disesuaikan dengan perkembangan terkini untuk mendorong pemanfaatan air di kawasan konservasi secara lestari.
- 2) Memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, peningkatan kelembagaan, dan pelatihan SDM kepada UPT untuk penyiapan prakondisi dan tata kelola pemanfaatan air di kawasan konservasi.
- 3) Menyusun data potensi air di kawasan konservasi serta pemanfaatan melalui data base yang terintegrasi dengan UPT.

-
- 4) Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi izin usaha pemanfaatan air dan energi air secara rutin untuk penilaian kinerja pemegang izin agar menuju kinerja yang baik.
 - 5) Koordinasi/konsultasi kesemua stakeholder untuk menjamin pemanfaatan air di kawasan konservasi dapat berjalan dengan baik dan lestari.
- Dengan terbitnya Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pada Pasal 33 ayat 1 diatur bahwa "Setiap orang dilarang melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan kelestarian alam", maka strategi tambahan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target IKK sebagai berikut:
- 1) Revisi NSPK pemanfaatan jasa lingkungan air yang terkait dengan UU 17/2019.
 - 2) Melakukan pembinaan unit pemanfaatan air dan energi air, baik izin komersial maupun izin non komersial.
 - 3) Melakukan pengendalian pemanfaatan jasa lingkungan air yang belum mempunyai izin, khususnya pemanfaatan air non komersial.
 - 4) Melakukan pengawasan unit pemanfaatan jasa lingkungan air bagi pemegang izin komersial dan pemegang izin non komersial.
4. Jumlah destinasi wisata alam *Science, Academic, Voluntary, Education* minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun
- 1) Penyiapan/prakondisi kawasan konservasi seperti zonasi/bloking, Rencana Pengelolaan, Desain Tapak, perhitungan daya dukung daya tampung kawasan dan pengunjung, masterplan wisata alam, rencana pemberdayaan masyarakat, rencana pemulihan ekosistem dan dokumen perencanaan lainnya.
 - 2) Pembangunan infrastruktur dan pengembangan produk seperti pengembangan aktivitas wisata, penerapan 5 A (*Attraction, Activity, Amenity, Accommodation, Accessibility*), pembangunan infrastruktur dan sarpras, manajemen pengunjung, manajemen sampah, inovasi dan diversifikasi produk, izin dan kerjasama dengan para pihak
 - 3) Meningkatkan efektifitas promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan melalui pameran, media sosial, media cetak dan elektronik.
 - 4) Membangun kerjasama dengan lembaga atau institusi lain dalam rangka pencapaian target jumlah kunjungan dan peningkatan kualitas kunjungan.
 - 5) Membangun database pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam.
5. Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun
- 1) Penyiapan/prakondisi kawasan konservasi seperti zonasi/bloking, Rencana Pengelolaan, Desain Tapak, perhitungan daya dukung daya tampung kawasan dan pengunjung, masterplan wisata alam, rencana pemberdayaan masyarakat, rencana pemulihan ekosistem dan dokumen perencanaan lainnya.
 - 2) Pembangunan infrastruktur dan pengembangan produk seperti pengembangan aktivitas wisata, penerapan 5 A (*Attraction, Activity, Amenity, Accommodation, Accessibility*), pembangunan infrastruktur dan sarpras, manajemen pengunjung,

- manajemen sampah, inovasi dan diversifikasi produk, izin dan kerjasama dengan para pihak
- 3) Meningkatkan efektifitas promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan melalui pameran, media sosial, media cetak dan elektronik.
 - 4) Membangun kerjasama dengan lembaga atau institusi lain dalam rangka pencapaian target jumlah kunjungan dan peningkatan kualitas kunjungan.
 - 5) Membangun database pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam.

C. Perjanjian Kinerja (PK)

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jo. Renstra Ditjen KSDAE dan Renstra Direktorat PJLKK Tahun 2020-2024, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi berada dan melaksanakan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, maka ditetapkanlah Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PJLKK yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Perjanjian kerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Direktur Jenderal KSDAE kepada Direktur PJLKK untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Direktur PJLKK tahun 2022 adalah sebagaimana Tabel 6.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Antara Direktur PJLKK dengan Direktur Jenderal KSDAE.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022
1.	Terjaminnya Efektivitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi serta Kolaborasi Pengelolaan Kawasan	Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun	15 Destinasi
		Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon minimal sebanyak 40 entitas selama 5 tahun	9 Entitas
		Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan air minimal sebanyak 60 entitas selama 5 tahun	10 Entitas
		Jumlah destinasi wisata alam <i>science, academic, voluntary, education</i> minimal sebanyak 52 destinasi selama 5 tahun	7 Destinasi
		Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun	3 Destinasi

Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Direktur PJLKK Tahun 2022 yang telah disahkan pada Bulan Desember 2021, mengalami revisi nominal anggaran pada Bulan Januari s/d Mei 2022. Hal ini terkait dengan pencadangan anggaran (Automatic Ajusment). Semula anggaran adalah Rp 7.298.556.000 menjadi Rp 6.650.091.000.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PJLKK Tahun 2022, langkah dan strategi dengan dukungan komponen dan sub komponen kegiatan tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7. Komponen dan Sub Komponen Kegiatan Pendukung Dalam Rangka Pencapaian IKK Direktorat PJLKK Tahun 2022.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Sub Komponen
1.	Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas minimal Sebanyak 15 Destinasi selama 5 Tahun	Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Prioritas	Penyusunan NSPK Penetapan Dokumen Tapak Fasilitasi Penyiapan Destinasi Wisata Alam Prioritas Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Desain Tapak Penyusunan FS dan DED Pertimbangan Teknis IUPSWA Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam Sesuai DED
		Pengelolaan Wisata Alam Berbasis Masyarakat	Penyusunan NSPK Pemantauan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Wisata Alam Pelatihan/benchmarking pengelolaan wisata alam Peningkatan usaha ekonomi wisata alam
		Promosi dan Pemasaran Wisata Alam	Penyusunan Program Promosi dan Pemasaran Wisata Alam Penyusunan Bahan Promosi dan Pemasaran Wisata Alam Penyelenggaraan even promosi dan pemasaran wisata alam: Peringatan HKAN, Festival Taman Nasional, Talkshow Operasionalisasi Website, Aplikasi Wisata dan Media Sosial Penyelenggaraan Pameran

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Sub Komponen
			Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam <i>travel mart, buyer meet seller, buyer meet buyer</i>
		Pengendalian, Pemantauan, Evaluasi dan Pembinaan IPPA	Fasilitasi dan Verifikasi perizinan wisata alam
			Pemantauan, evaluasi dan pembinaan IUPSWA
			Pemantauan, evaluasi dan pembinaan IUPJWA
			Peningkatan Kapasitas pemegang IPPA
2.	Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Alam minimal Sebanyak 60 entitas selama 5 tahun	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air/Energi Air	Penyusunan NSPK Penilaian Dokumen PJLA Pembentukan/ Pengembangan/ Penguatan Kelembagaan PJLA Supervisi monitoring dan evaluasi Penetapan Area Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Penilaian Kinerja Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air/Energi Air Monitoring dan Evaluasi
	Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon minimal Sebanyak 40 entitas selama 5 tahun	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi	Penyusunan NSPK Verifikasi Pelayanan Perizinan Pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi Monitoring dampak kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi Evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi Koordinasi Pemanfaatan Supervisi Pemanfaatan Penyusunan Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Jasling Panas Bumi Penyusunan kajian kehati di lokasi dengan potensi panas bumi
		Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon	Penyusunan NSPK Verifikasi Layanan Bidang Jasling Karbon

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Sub Komponen
			Fasilitasi- dukungan pemanfaatan Jasling Karbon
			Supervisi Pengembangan Pemanfaatan Jasling Karbon
			Integrasi Jasling ke dalam Stok Karbon Berbasis Ekosistem di Taman Nasional
	Promosi dan Pemasaran Non Wisata Alam	Penyusunan NSPK	
			Penyusunan bahan promosi dan pemasaran
			Pengembangan Bina Cinta Alam
			Penyusunan Strategi Komunikasi Konservasi Alam
			Peningkatan Kapasitas Kader Konservasi
			Operasionalisasi Website, Aplikasi Wisata dan Media Sosial
			Penyelenggaraan Pameran
			Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam <i>travel mart, buyer meet seller, buyer meet buyer</i>
3.	Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> minimal Sebanyak 7 Destinasi Selama 5 Tahun	Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Berbasis SAVE	Penyusunan NSPK
			Penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan kawasan
			Penyusunan rencana pengelolaan wisata alam berbasis SAVE
			Fasilitasi penyiapan destinasi wisata alam SAVE
			Pembangunan sarana prasarana destinasi wisata alam SAVE
	Pengembangan Ecoedutourism	Penyusunan rencana pengelolaan ecoedutourism	
			Pendampingan dan peningkatan kapasitas SDM pengelolaan ecoedutourism
			Peningkatan usaha ekonomi wisata alam
			Fasilitasi dan verifikasi perizinan jasa wisata alam
			Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan IPPA
			Penyusunan Program Promosi dan Pemasaran Wisata Alam

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Sub Komponen
	Promosi dan Pemasaran Wisata Alam Berbasis SAVE		Penyusunan Bahan Promosi dan Pemasaran Wisata Alam
			Penyelenggaraan even promosi dan pemasaran wisata alam: Peringatan HKAN, Festival Taman Nasional, Talkshow
			Operasionalisasi Website, Aplikasi Wisata dan Media Sosial
			Penyelenggaraan Pameran
			Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam <i>travel mart, buyer meet seller, buyer meet buyer</i>
4.	Jumlah Destinasi Wisata Alam Bahari Minimal Sebanyak 3 Destinasi Selama 5 Tahun	Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Bahari	Penyusunan NSPK
			Pemantauan, evaluasi dan pembinaan pemanfaatan wisata bahari
			Penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan kawasan
			Fasilitasi penyiapan destinasi wisata bahari
			Pembangunan sarana prasarana destinasi wisata bahari
		Pengelolaan Wisata Alam Berbasis Masyarakat	Penyusunan NSPK
			Pemantauan, evaluasi dan pembinaan pemanfaatan wisata alam
			Pelatihan/benchmarking pengelolaan wisata alam
			Peningkatan usaha ekonomi wisata alam
	Promosi dan Pemasaran Wisata Bahari		Penyusunan Program Promosi dan Pemasaran Wisata Alam
			Penyusunan Bahan Promosi dan Pemasaran Wisata Alam
			Penyelenggaraan even promosi dan pemasaran wisata alam: Peringatan HKAN, Festival Taman Nasional, Talkshow
			Operasionalisasi Website, Aplikasi Wisata dan Media Sosial
			Penyelenggaraan Pameran
			Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam <i>travel mart, buyer meet seller, buyer meet buyer</i>

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Sub Komponen
		Pengendalian, Pemantauan, Evaluasi dan Pembinaan	Fasilitasi dan Verifikasi perizinan wisata alam
			Pemantauan, evaluasi dan pembinaan IUPSWA
			Pemantauan, evaluasi dan pembinaan IUPJWA
			Peningkatan Kapasitas pemegang IPPA

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan melalui penetapan kinerja diawal tahun anggaran sebagai implementasi pelaksanaan misi dan visi di dalam Renstra Direktorat PJLKK 2020-2024. Nilai Kinerja Organisasi diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKK yang tersedia, dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKK, akan diperoleh indeks capaian IKK untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator Hasil perhitungan yaitu persentase capaian dengan cara perhitungan :

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pencapaian Rencana Tk. Capaian} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk pengukuran nilai capaian indikator kinerja perlu memperhitungkan jenis polaritas IKK yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize* dan *stabilize*, maka digunakan pembatasan nilai capaian IKK yaitu :

- Angka maksimal adalah 150; dan
- Angka minimal adalah 0.

2. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Direktorat PJLKK tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing perspektif. Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Direktorat PJLKK dengan Ditjen KSDAE yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian

Kinerja terdapat 5 kegiatan pokok IKK yang telah ditetapkan. Dari 5 IKK yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 secara keseluruhan sudah tercapai. Adapun capaian kinerja Direktorat PJLKK tahun 2022 adalah sebagaimana Tabel 8.

Tabel 8. Capaian Kinerja Direktorat PJLKK Tahun 2022.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terjaminnya Efektivitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan	Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun	15 Destinasi	15 Destinasi	100
Konservasi serta Kolaborasi Pengelolaan Kawasan	Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi dan karbon minimal sebanyak 40 entitas selama 5 Tahun	9 Entitas	8 Entitas	88,88
	Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan Air sebanyak 60 Izin selama 5 Tahun	10 Entitas	11 Entitas	110
	Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> (SAVE) sebanyak 52 Destinasi selama 5 Tahun	7 Destinasi	7 Destinasi	100
	Jumlah Destinasi Wisata Alam Bahari Sebanyak 7 Destinasi selama 5 Tahun	3 Destinasi	3 Destinasi	100

Penjelasan atas capaian kinerja untuk masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 pada Direktorat PJLKK adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1

Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas Minimal Sebanyak 15 Destinasi Selama 5 Tahun

Salah satu upaya dalam mendukung agenda pembangunan nasional, mendukung tercapainya tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dan mendukung program KSDAE, Direktorat PJLKK berkontribusi dalam Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun" dengan capaian tahun 2022 ditampilkan pada tabel 8. Adapun Target lokasi 15 Destinasi tersebut adalah (1) TN Bromo Tengger Semeru, (2) TN Bantimurung Bulusaraung, (3) TN Gunung Rinjani, (4) TN Bali Barat, (5) TWA Kawah Ijen, (6) TN Gunung Merapi, (7) TN Gunung Merbabu, (8) TN Gunung Tambora, (9) TN Kelimutu, (10) TWA Gunung Tunak, (11) TWA Muka Kuning, (12) TWA Sorong, (13) TWA Tanjung Belimbang, (14) TN Betung Kerihun Danau Sentarum, dan (15) TN Teluk Cendrawasih. Hasil pencapaian kinerja tahun 2022 atas kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas Minimal Sebanyak 15 Destinasi Selama 5 Tahun.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah destinasi wisata alam prioritas (Destinasi)	15 Destinasi	15 Destinasi	100 %

Indikator ini diukur dengan membandingkan parameter dalam destinasi wisata alam prioritas berupa:

1. Tersedianya Areal Pemanfaatan Wisata Alam di Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis berupa penyusunan desain tapak dan masterplan; dan kegiatan dari pusat yaitu pengesahan desain tapak dan masterplan. Masing-masing kegiatan dengan target 15 destinasi pada tahun 2022.
2. Tersedianya Kelembagaan Pengembangan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis yaitu pemberian izin IUPJWA; dan kegiatan dari pusat berupa peningkatan kapasitas pemegang izin IUPJWA, pemberian sertifikasi pemegang izin IUPJWA, pengesahan dokumen RPPA dan bimbingan teknis pengusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi. Masing-masing kegiatan dengan target 15 destinasi pada tahun 2022.
3. Efektifitas Pemanfaatan Wisata Alam dalam Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis berupa penilaian kinerja pemegang IUPJWA dan kegiatan

- dari pusat yaitu evaluasi kinerja pemegang IUPSWA. Masing-masing kegiatan dengan target 15 destinasi pada tahun 2022.
4. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis berupa pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana wisata alam dan kegiatan dari pusat berupa pengesahan FS dan DED dan supervisi pembangunan sarana dan prasarana wisata alam. Masing-masing kegiatan dengan target 15 destinasi pada tahun 2022.

Pada Pada tahun 2022, capaian IKK pada "Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun" adalah 15 destinasi, dengan capaian persentase sebesar 100%. Adapun 15 destinasi tersebut adalah TN Bromo Tengger Semeru, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Rinjani, TN Bali Barat, TWA Kawah Ijen, TN Gunung Merapi, TN Merbabu, TN Tambora, TN Kelimutu, TWA Gunung Tunak (BKSDA NTB), TWA Muka Kuning (BBKSDA Riau), TWA Sorong, TWA Tanjung Belimbing, TN Betung Kerihun dan TN Teluk Cendrawasih. Secara lengkap, data capaian IKK "Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun" tersaji pada Tabel 10.

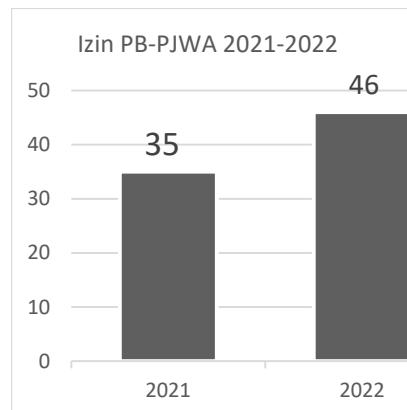
Tabel 10. Data Capaian IKK 1.

No.	Parameter	Uraian
1	Tersedianya Areal Pemanfaatan Wisata Alam di Kawasan Konservasi	Prakondisi Kawasan berupa Pengesahan Desain Tapak di Taman Nasional Gunung Merbabu dan Revisi Desain Tapak Zona Pemanfaatan di Taman Nasional Gunung Merapi. Sampai sampai dengan tahun 2022 terdapat 1 destinasi yaitu TWA Tanjung Belimbing belum, sedangkan destinasi lainnya desain tapaknya sudah disahkan.
2	Kelembagaan Pengembangan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas interpreter dan masyarakat pelaku wisata alam di sekitar TN Bali Barat, TN Gunung Rinjani dan TWA Gunung Tunak. Pada tahun 2022 telah diterbitkan 3 unit PB-PJWA di TN Bantimurung Bulusaraung dan 29 unit PB-PJWA di TN Gunung Rinjani. Pemberian izin PB-PSWA yaitu 1 izin PB-PSWA di TN Gunung Rinjani dan 1 izin PB-PSWA di TN Gunung Merbabu.
3	Terselenggaranya Efektifitas Pemanfaatan Wisata Alam dalam Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi 5 unit PB-PSWA, dengan rincian pada Taman Nasional Gunung Rinjani 1 unit, TWA Kawah Ijen 1 unit, TWA Gunung Tunak 1 unit, dan TWA Muka Kuning 2 unit.

No.	Parameter	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring rutin pembangunan sarpras di 15 destinasi
4	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Konservasi	<p>Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana wisata alam sebanyak 14 destinasi yaitu TN Bromo Tengger Semeru, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Rinjani, TN Bali Barat, TN Gunung Merapi, TN Merbabu, TN Tambora, TN Kelimutu, TWA Muka Kuning (BBKSDA Riau), TWA Kawah Ijen, TWA Sorong, TWA Gunung Tunak, TWA Tanjung Belimbing, dan TN Teluk Cendrawasih.</p>

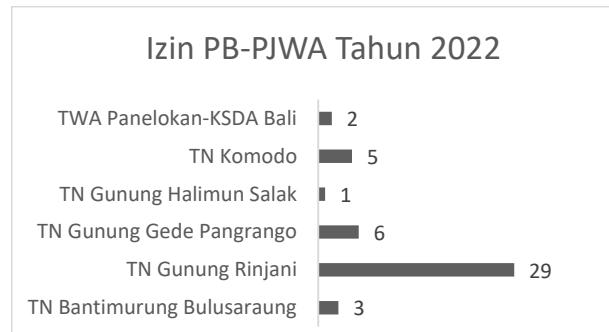
Uraian parameter yang pertama yaitu tersedianya Areal Pemanfaatan Wisata Alam di Kawasan Konservasi. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pengesahan prakondisi Kawasan berupa Desain Tapak di Taman Nasional Gunung Merbabu dan Revisi Desain Tapak Zona Pemanfaatan di Taman Nasional Gunung Merapi. Hal ini sesuai dengan terbitnya SK.60/ PJLKK/PJLWAKK/KSA.3/11/2022 tanggal 2 November 2022 untuk pengesahan desain tapak di Taman Nasional Gunung Merbabu dan terbitnya SK.59/PJLKK/ PJLWAKK/KSA.3/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 untuk revisi desain tapak Zona Pemanfaatan di Taman Nasional Gunung Merapi.

Uraian parameter yang kedua yaitu Kelembagaan Pengembangan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi. Pada tahun 2022, total izin PB-PJWA yang telah diterbitkan sebanyak 46 izin. Total izin PB-PJWA sebanyak 46 izin tersebut meningkat dari tahun 2021 yang hanya berjumlah 35 izin PB-PJWA sebagaimana terlihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Izin PB-PJWA 2021-2022

46 (empat puluh enam) Izin PB-PJWA yang telah diterbitkan pada tahun 2022 tersebut berlokasi di 1 Taman Wisata Alam dan 6 Taman Nasional. Adapun rincian dari lokasi tersebut terdiri dari Taman Wisata Alam Panelokan – KSDA Bali, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Halimun Salak, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Rinjani, dan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Sebagaimana terlihat pada Gambar bahwa penerbitan izin PB-PJWA pada tahun 2022 terbanyak berlokasi di Taman Nasional Gunung Rinjani dengan jumlah izin sebanyak 29 izin PB-PJWA.



Gambar 8. Izin PB-PJWA Tahun 2022

Dari 46 izin PB-PJWA tersebut yang termasuk ke dalam lokasi target Indikator Kinerja Kegiatan pada "Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun" yaitu 3 unit PB-PJWA di TN Bantimurung Bulusaraung dan 29 unit PB-PJWA di TN Gunung Rinjani. Secara lengkap, data izin PB-PJWA pada 3 unit PB-PJWA di TN Bantimurung Bulusaraung dan 29 unit PB-PJWA di TN Gunung Rinjani tersaji pada tabel 11.

Tabel 11. Izin PB-PJWA 2022

No	Bentuk PB-PJWA	Lokasi	Jenis Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam			
			Perjalanan Wisata	Jasa Transportasi	Informasi Wisata	Makanan dan Minuman
1	Badan Usaha (Swasta)	TN Bantimurung Bulusaraung		1	1	1
2	Perorangan	TN Gunung Rinjani	29			

Selain PB-PJWA, output penguatan kelembagaan pariwisata alam di Kawasan konservasi pada tahun 2022 yaitu diterbitkannya izin PB-PSWA. Pada tahun 2022, total izin PB-PSWA yang telah diterbitkan sebanyak 12 izin PB-PSWA. Atas penerbitan 12 izin PB-PSWA tersebut, yang termasuk ke dalam lokasi target Indikator Kinerja Kegiatan pada "Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5

tahun" terdiri dari 1 izin PB-PSWA di TN Gunung Rinjani atas nama PT Rinjani Panorama Elok dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 91203031428560001 tanggal 30 September 2022 dengan luas 19,38 Ha dan 1 izin PB-PSWA di TN Gunung Merbabu atas nama PT Smaga Meru Lestari dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin: 81200038715140002 tanggal 10 Juni 2022 dengan luas 27,9 Ha.

Tabel 11. Izin PB-PSWA 2022

No	UPT	Nama Perusahaan	SK Menteri/ an Menteri	Masa Berlaku	Lokasi	Luas
1	TN Gunung Rinjani	PT Rinjani Panorama Elok	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 91203031428560001 tanggal 30 September 2022	2022 sd 2057		19,38
2	TN Merbabu	PT Smaga Meru Lestari	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 81200038715140002 tanggal 10 Juni 2022	2022 sd 2057	ZP Kalipasang	27,9

Uraian parameter yang ketiga yaitu Terselenggaranya Efektifitas Pemanfaatan Wisata Alam dalam Kawasan Konservasi. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan penilaian efektivitas pemanfaatan wisata alam di Kawasan Konservasi melalui kegiatan evaluasi kinerja pemegang PB-PSWA yang dilaksanakan pada 25 unit PB-PSWA. Dari 25 unit PB-PSWA tersebut, 5 unit diantaranya termasuk ke dalam lokasi target Indikator Kinerja Kegiatan pada "Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun" yang terdiri dari 1 unit PB-PSWA di TN Gunung Rinjani atas nama PT. Joben Evergreen, 1 unit PB-PSWA di TWA Kawah Ijen atas nama PT. Sura Parama Setia, 1 unit PB-PSWA di TWA Gunung Tunak atas nama PT Karyapratama Rekajaya, 2 unit PB-PSWA di TWA Muka Kuning atas nama PT. Papanjaya Sejahtera dan PT. Lise Batam Rimba Lestari.

Uraian parameter yang keempat yaitu pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di Kawasan Konservasi. Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di Kawasan Konservasi menjadi upaya dalam mendukung pengembangan wisata alam pada 15 destinasi prioritas. Pada tahun 2022, pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di Kawasan Konservasi dilaksanakan pada 14 destinasi prioritas. Secara lengkap, rincian data

Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Tahun 2022

No.	Lokasi Target	Uraian
1	TN Bromo Tengger Semeru	<p><i>Realisasi 100%</i></p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi • Pengadaan Perangkat Sarana Prasarana Monitoring Pendakian Semeru • Pengadaan Kamera Trap • Pengadaan peralatan dan mesin berupa AC dan Laptop • Pengadaan Perlengkapan Media Center • Pengadaan genset gasoline • Pembangunan Rumah Genset Kantor Balai • Penambahan Nilai Gedung Bangunan Kanopi Kantor Pelayanan Pengunjung Ranu Pani
2	TN Bantimurung Bulusaraung	<p><i>realisasi 100 %.</i></p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Pembangunan Talud Site Wisata Leang Londrong • Perencanaan Rehab Plafond Pusat Informasi Site Wisata Bulusaraung • Perencanaan Penataan Areal Parkir Pusat Informasi Site Wisata Bulusaraung • Perencanaan Jalan Trail Site Wisata Leang Londrong • Perencanaan Pembangunan Papan Informasi Site Wisata Leang Londrong • Perencanaan Pembangunan Pintu Gerbang Site Wisata Leang Londrong • Fisik Pembangunan Talud Site Wisata Leang Londrong • Fisik Rehab Plafond Pusat Informasi Site Wisata Bulusaraung • Fisik Penataan Areal Parkir Pusat Informasi Site Wisata Bulusaraung • Fisik Jalan Trail Site Wisata Leang Londrong • Fisik Pembangunan Papan Informasi Site Wisata Leang Londrong • Fisik Pembangunan Pintu Gerbang Site Wisata Leang Londrong • Pengawasan Pembangunan Talud Site Wisata Leang Londrong • Pengawasan Rehab Plafond Pusat Informasi Site Wisata Bulusaraung • Pengawasan Penataan Areal Parkir Pusat Informasi Site Wisata Bulusaraung • Pengawasan Jalan Trail Site Wisata Leang Londrong • Pengawasan Pembangunan Papan Informasi Site Wisata Leang Londrong • Pengawasan Pembangunan Pintu Gerbang Site Wisata

No.	Lokasi Target	Uraian
		<p>Leang Londrong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Rehab Menara Pengawas Site Wisata Bantimurung • Fisik Rehab Menara Pengawas Site Wisata Bantimurung • Pengawasan Rehab Menara Pengawas Site Wisata Bantimurung
3	TN Gunung Rinjani	<p><i>realisasi 100 %.</i></p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Checkpoint Jalur Pendakian Torean • Pembangunan Fasilitas Kuliner Joben • Pembangunan Jaringan Listrik Tenaga Matahari Checkpoint Sembalun dan Torean • Pengadaan Sarpras Pendukung/meubelair Checkpoint Sembalun dan Torean • Pemeliharaan Server Aplikasi • Upgrade aplikasi E-Rinjani • Pembangunan Signboard Destinasi Otak Kokok Joben • Pembangunan Toilet Destinasi Ulem-ulem
4	TN Bali Barat	<p><i>realisasi 100 %.</i></p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendukung Promosi Wisata Alam • Pembelian Patung • Pemeliharaan Kendaraan (pemeliharaan speedboat 7 meter, 14 meter dan 9 meter) • Pengadaan Bahan promosi belanja bahan persediaan barang konsumsi (Tas souvenir, Tumbler, Flasdisk, Gantungan Kunci, dan Kalender) • Perencanaan penyelesaian pekerjaan rehab kendang kubah Curik Bali di Teluk Brumbun Tahun 2021 • Pekerjaan Kontruksi penyelesaian pekerjaan rehab kendang kubah Curik Bali di Teluk Brumbun Tahun 2021 • Pengawasan penyelesaian pekerjaan rehab kendang kubah Curik Bali di Teluk Brumbun Tahun 2021
5	TWA Kawah Ijen	<p><i>Realisasi 4,57% (keuangan)</i></p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan turap/plengsengan (tahapan perencanaan)
6	TN Gunung Merapi	<p><i>realisasi 100%.</i></p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Gerbang, Loket dan penataan <i>landscape</i> pintu masuk OWA Kalikuning • Pembangunan dan penataan Jalur tracking kalikuning - umbul temanten • Penataan air terjun tlogo muncar dan talud sungai • Perbaikan dan penataan jalur tracking Goa Jepang - Plawangan - Pronojiwo

No.	Lokasi Target	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan MCK • Pembuatan Soft Tracking Jalur Sapuangin _ Deles • Rehab Kantor SPTN WIlayah II • Pengadaan AC Split • Pemasangan Teralis • Peralatan dan perlengkapan mess • Pengadaan Kamera Prosumer • Unit Penguat relay sinyal dan Repetear link • Pagar Keliling dan Pintu Gerbang Mess Wisata
7	TN Gunung Merbabu	<p><i>realisasi 100%.</i></p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan wisata Umbul 9 • Pengembangan Wisata Kalipasang • Sarpras Pendukung Wisata • Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Wisata
8	TN Gunung Tambora	<p><i>realisasi 100%.</i></p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Meubeler <i>Visitor Center</i> • Pengadaan Peralatan Pendukung PNBP • Pengadaan Peralatan Pendukung Si Tapir • Pengadaan Tandon Air <i>Visitor Center</i> • Pembuatan Jembatan Akses Jalur Pendakian Kawinda Toi • Pengawasan Pembuatan Jembatan Akses Jalur Pendakian Kawinda Toi
9	TN Kelimutu	<p><i>Realisasi 91 %</i></p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Tembok Penyokong Areal Wisata • Rehab Kantor SPTN II Detusoko • Pembuatan Sumur Bor • Rehab Kantor SPTN I Moni • Pembangunan Gudang Arsip • Pengembangan dan Penataan Kantor Balai • Peralatan Meubeler/ Elektronik / Multimedia • Monitoring dan Supervisi
11	TWA Muka Kuning	<p><i>realisasi 100%.</i></p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Pembangunan Ruang Jasa Kuliner TWA Mukakuning • Pengawasan Pembangunan Ruang Jasa Kuliner TWA Mukakuning • Pengelolaan Administrasi dan Teknis Pembangunan Ruang Jasa Kuliner TWA Mukakuning
12	TWA Sorong	<p><i>realisasi 100 %</i></p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Pembangunan Talud Jembatan TWA Sorong

No.	Lokasi Target	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Fisik Pembangunan Talud Jembatan Twa Sorong • Pengawasan Pembangunan Talud Jembatan TWA Sorong • Perencanaan Pembangunan Jembatan Dan Pergola TWA Sorong • Pekerjaan Fisik Pembangunan Jembatan Dan Pergola TWA Sorong • Pengawasaan Pembangunan Jembatan Dan Pergola TWA Sorong • Penyediaan Sumur Bor Kantor Resort KSDA Sorong di TWA Sorong • Pemasangan Listrik TWA Sorong
13	TWA Tanjung Belimbing	<p><i>realisasi 100%.</i></p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Renovasi Sarana Prasarana Wisata Alam di TWA. Tanjing Belimbing • Fisk Renovasi Sarana Prasarana Wisata Alam di TWA. Tanjing Belimbing • Pengawasan Renovasi Sarana Prasarana Wisata Alam di TWA. Tanjing Belimbing
14	TN Betung Kerihun Danau Sentarum	<i>NIHIL (Terkena automatic adjustment)</i>
15	TN Teluk Cendrawasih	<p><i>realisasi 100%.</i></p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rehab Pondok Kerja Isenebuai Untuk Mendukung Wisata di Pulau Rumberpon • Pengadaan Peralatan Pondok Kerja Untuk Mendukung Wisata Aisandami • Pengadaan Dispenser Untuk Pondok Kerja Aisandami

Pada tahun 2022, pembangunan sarana/prasarana di TN Bromo Tengger Semeru, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Rinjani, TN Bali Barat, TN Gunung Merapi, TN Merbabu, TN Tambora, TN Kelimutu, TWA Gunung Tunak (BKSDA NTB), TWA Muka Kuning (BBKSDA Riau), TWA Sorong, TWA Tanjung Belimbing dan TN Teluk Cendrawasih mempunyai realisasi fisik sebesar 100%, sedangkan TWA Kawah Ijen dalam pembangunan turap/plengsengan tahap I hanya sampai pada tahap perencanaan saja karena sisa anggaran terkena automatic adjustment dan menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dalam pencatatan asset BMN.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja jumlah destinasi pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam (Prioritas, SAVE, dan Bahari) di kawasan konservasi, kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Penyusunan/Penyempurnaan NSPK Bidang Pemanfaatan Wisata Alam

Kegiatan ini bertujuan untuk penyempurnaan NSPK dan penyusunan NSPK baru sebagai acuan dan arahan teknis penyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam.

2. Pengesahan Desain Tapak, kegiatan ini bertujuan untuk merencanakan pengembangan wisata alam yang akan dilakukan. Output kegiatan ini adalah dokumen Desain Tapak yang sudah telah mendapat pengesahan, baik yang berada pada lokasi target maupun diluar lokasi target. Desain tapak yang telah mendapat pengesahan pada tahun 2022 tersaji pada Tabel 13.

Tabel 13. Lokasi Penetapan Desain Tapak Pada Tahun 2022

Uraian	Pengesahan
Desain Tapak	<ol style="list-style-type: none">1. Zona Pemanfaatan Danau Belibis2. Zona Pemanfaatan Gunung Kunyit3. Blok Pemanfaatan TWA Pelaihari, Kalimantan Selatan4. Blok Pemanfaatan TWA Pulau Burung dan Pulau Suwangi, Kalimantan Selatan5. Zona Pemanfaatan Batu Rongring, Batu Katak & Pamah Semelir, TNGL6. Zona Pemanfaatan Bidang Pengelolaan TN Wilayah II Kutacane (Lawe Gurah dan Aih Panas) TNGL7. Blok Pemanfaatan TWA Tanjung Tampa NTB8. Pengesahan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam TWA Danau Dendam Tak Sudah Provinsi Bengkulu9. Pengesahan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Dolok Tinggi Raja, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara10. Desain tapak zona pemanfaatan wilayah pendakian puncak cartensz, TN Lorentz11. Desain Tapak Zona Pemanfaatan Selang Pangeran dan Sikundur, TN Gunung Leuser12. Desain Tapak Zona Pemanfaatan Gunung Seblat, TN Kerinci Seblat13. Desain Tapak blok pemanfaatan Tahura Bontobahari, Kab. Bulukumba14. Desain Tapak Zona Pemanfaatan Bontang Mangrove Park, TN Kutai15. Desain Tapak Zona Pemanfaatan Gunung Kemiri, TN Gunung Leuser16. Desain Tapak Zona Pemanfaatan Lbak Siuh Curug Kembar, TN Gunung Gede Pangrango17. Desain Tapak Zona Pemanfaatan Cantra, TN Gunung Gede Pangrango18. Desain Tapak Zona Pemanfaatan Arca dan Pasir Koja, TN Gunung Gede Pangrango19. Revisi Desain Tapak Zona Pemanfaatan TN Gunung Merapi20. Desain Tapak TN Gunung Merbabu21. Desain Tapak TN Kepulauan Seribu22. Desain Tapak zona pemanfaatan Curug Cikatumbiri TNGGP

3. Penerbitan Izin Usaha (PB-PJWA/PB-PSWA). Pada tahun 2022, penerbitan izin Usaha seluruhnya mencapai 58 unit yang terdiri dari 46 unit PB-PSWA dan 12 unit PB-PJWA yang diterbitkan izin definitifnya secara manual melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE selaku atas nama Menteri LHK.
4. Evaluasi Kinerja PB-PSWA tahun 2022 dilaksanakan pada 25 unit IUPSWA/PB-PSWA. Penentuan lokasi evaluasi kinerja pada tahun 2022 antara lain dilakukan berdasarkan SK menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pencabutan izin konsesi Kawasan Hutan (termasuk ke dalam Lampiran II dan III) dan izin yang memiliki lokasi yang sama atau pun izin yang perlu pemantauan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengusahaan pariwisata alam terhadap 25 (Dua puluh lima) perusahaan pemegang IUPSWA/ PB - PSWA sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.03/KSDAE/SET/KSA.3/8/2019 tentang Pedoman Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam diperoleh hasil sebagaimana tabel 14.

Tabel 14. Hasil Evaluasi Kinerja PB-PSWA Tahun 2022

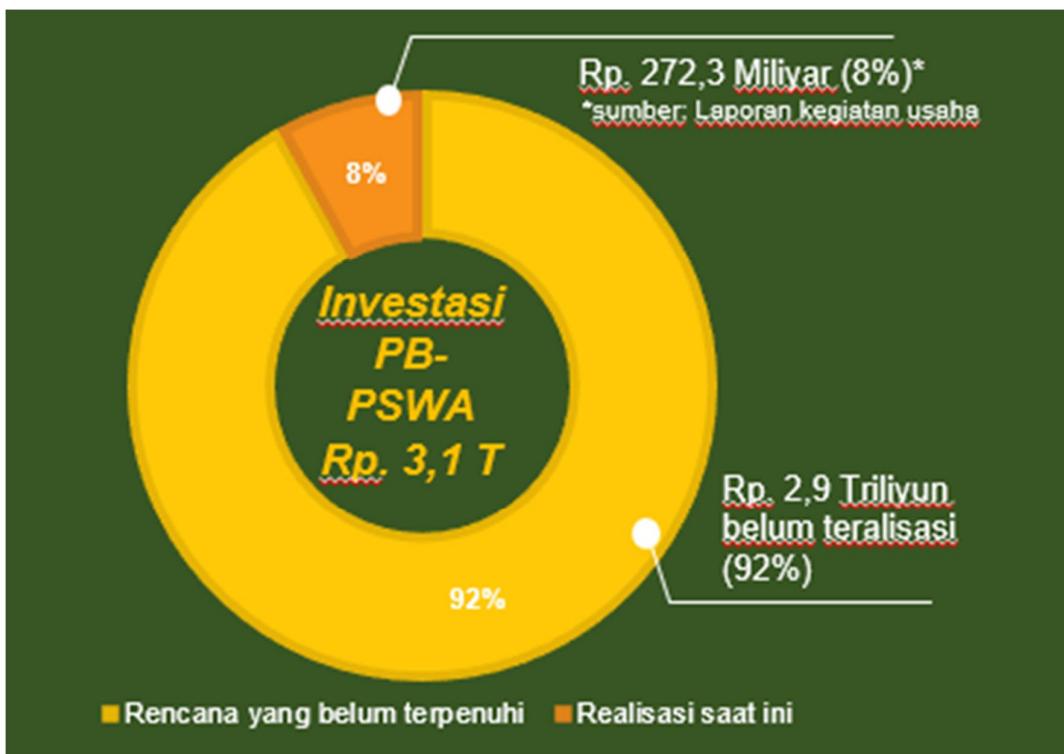
No	NAMA PERUSAHAAN	KLASTER KINERJA	SKOR ADMINISTRASI	SKOR TEKNIS	SKOR KETAATA N	NILAI AKHIR	KATEGORI	EVALUASI KOMITMEN 6 BULAN (Mar-Agustus 2022)
1	PT. Mitra Alam	Lampiran II	18	52	0	70	0,70 (Buruk)	90%
2	PT Prabu Alam Lestari	Lampiran III	0	12	0	12	0,12 (Buruk)	75%
3	PT. Bangko-Bangko Lestari	Lampiran III	0	42	0	42	0,42 (Buruk)	57,14%
4	PT Ria So-Mila Pantai Indah	Lampiran III	3	152	-200	-45	-0,45 (Buruk)	65%
5	PT Karyapratama Rekajaya	Lampiran III	83	75	-100	58	0,65 (Buruk)	75%
6	PT Tabita Indah Sejahtera	Lampiran III	75	185	-100	160	1,80 (Buruk)	95%
7	PT Dinanda Selaras Lestari	Lampiran III	64	123	-100	87	0,98 (Buruk)	25%
8	PT. Joben Evergreen	Lampiran III	58	196	0	254	2,54 (Sedang)	99,24%
9	PT. Lise Batam Rimba Lestari	Lampiran III	31	225	0	256	2,56 (Sedang)	100%
10	PT. Linggau Bisa	Lampiran III	0	213	0	213	2,13 (Buruk)	97,92 %

11	PT. Pusaka Suaka Kulon	Lampiran III	0	0	-100	-100	-1 (Buruk)	0%
12	PT. Sura Parama Setia	Lampiran III	74	111	0	185	1,85 (Buruk)	Komit men 3 bulan
13	PT. Komodo Wildlife Ecotourism	Lampiran III	67	140	-100	107	1,07 (Buruk)	0% (menyusun EIA)
14	PT Segara Komodo Lestari	Lampiran III	19	12	-100	-69	-0,69 (Buruk)	0% (menyusun EIA)
15	PT. Moyo Safari Abadi	Non Lampiran	30	245	0	275	2,75 (Sedang)	-
16	PT. Wanasari Pramudita Ananta	Non Lampiran	109	275	0	384	3,84 (Sedang)	-
17	PT. Synergindo Niagatama	Non Lampiran	59	76	0	135	1,35 (Buruk)	-
18	Perum Perhutani	Non Lampiran	82	222	0	3,04	3,04 (Sedang)	-
19	CV. Amanah Sembilan Belas	Non Lampiran	98	350	0	448	4,48 (Baik)	-
20	CV. Bina Wana Lestari	Non Lampiran	44	228	0	272	2,72 (Sedang)	-
21	PT. Griya Sukses Mandiri	Non Lampiran	0	0	0	0	0 (Buruk)	-
22	PT. Wisata Pecinta Alam	Non Lampiran	111	42	0	153	1,53 (Buruk)	-
23	CV. Multi Agro Forestindo	Non Lampiran	71	189	0	260	2,6 (Sedang)	-
24	PT. Plengkung Indo	Non Lampiran	139	295	0	434	4,34 (Baik)	-
25	PT. Papanjaya Sejahtera	Non Lampiran	0	259	0	310	3,1 (Sedang)	-

Tidak Lanjut atas hasil evaluasi Kinerja PB-PSWA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. PT. Mitra Alam, PT. Joben Evergreen, PT. Lise Batam Rimba Lestari, PT. Tabitha Indah Sejahtera dan PT Linggau Bisa direkomendasikan untuk dikeluarkan dari lampiran SK Menteri LHK 01/2022.
- b. PT. Ria So Mila, PT Prabu Alam, PT. Karya Pratama Rekajaya agar terus berkoordinasi dengan UPT .
- c. PT. Dinanda Selaras Lestari dan PT. Pusaka Suaka Kulon → direkomendasikan untuk sanksi selanjutnya.
- d. PT. Sura Parama Setia → agar dicek progressnya, bila tidak ada progress dapat dilanjutkan ke sanksi (surat peringatan).
- e. PT. Komodo Wildlife Ecotourism dan PT. Segara Komodo Lestari → Surat Dirjen KSDAE Untuk segera melakukan penyusunan EIA.
- f. Non Lampiran :
PT. Griya Sukses Mandiri dan PT. Wisata Pecinta Alam → direkomendasikan sanksi (Surat Peringatan Pertama).

Potensi Perizinan Bidang Wisata Alam khususnya untuk meningkatkan sektor perekonomian secara nasional yaitu berupa adanya penyerapan tenaga kerja di bidang wisata alam. Dari 79 unit PB-PJWA mampu menyerap 1.500 tenaga kerja pada bidang pemandu, penyedia cinderamata, transportasi, dll. Sedangkan dari 97 unit PB-PSWA yang ada mampu menyerap 5.465 tenaga kerja pada bidang wisata alam. Adapun kendala perizinan bidang wisata alam dalam hal pencapaian IKK bidang wisata alam secara umum baik dukungan destinasi prioritas, destinasi SAVE maupun destinasi wisata bahari yaitu belum dapat tercapainya rencana investasi PB-PSWA yang telah direncanakan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Investasi PB-PSWA

Sebagaimana terlihat pada Gambar 5, rencana investasi PB-PSWA sebesar Rp. 3,1 triliun baru dapat terealisasi sebesar Rp. 272,3 miliar atau sekitar 8% dari rencana investasi PB-PSWA.

Terdapat 2 isu strategis dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan konservasi rencana makro KSDAE 2023-2040 yang terdiri dari Pengembangan wisata alam berkelanjutan (sustainable tourism) dan Potensi obyek daya tarik wisata alam memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi lokal. Dari isu strategis tersebut, terdapat 6 arahan kebijakan beserta dasar regulasi/ teknis implementasi sebagaimana dijelaskan pada Tabel 15.

Tabel 15. Arahan Kebijakan dan Dasar Regulasi/ Teknis Implementasi

No	ARAHAN KEBIJAKAN	DASAR REGULASI/ TEKNIS IMPLEMENTASI
1	Pengembangan wisata alam bukan pada areal dengan konsentrasi komunitas tumbuhan/biota utama dan bukan merupakan areal dengan keanekaragaman yang tinggi sehingga tujuan utama konservasi yaitu perlindungan, pemanfaatan, pengawetan dan perlindungan tetap terjaga	Penyusunan dokumen perencanaan kawasan, seperti blok/zonasi, rencana pengelolaan dan desain tapak pada kawasan konservasi sesuai fungsinya. Lokasi penataan kawasan yaitu 568 unit KK

2	Penataan tapak (ruang usaha dan ruang publik di seluruh zona/blok pemanfaatan taman nasional dan taman wisata alam	Targetnya lokasinya pada 55 TN, 130 TWA, 39 Tahura, 40 KSA/KPA. Penyusunan desain tapak Perdirjen PHKA No. P.5/IV-SET/2015 tentang Perubahan Atas Perdirjen PHKA No. P.3/IV-SET/2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di SM, TN, Tahura dan TWA
3	Penyusunan peta investasi jasa lingkungan wisata alam	Data PB-PSWA dan PB-PJWA, peta spasial sebaran perizinan berusaha dan Ruang Usaha pada tiap kawasan konservasi
4	Pengembangan wisata alam dapat dilakukan oleh masyarakat dan diutamakan oleh masyarakat setempat	Data sebaran PB-PJWA pada setiap Kawasan konservasi serta sebaran potensi ODTWA di sekitar desa penyanga. Regulasinya PP5/2021, P.8/2019, P.3/2021, P.43/2017 pemberdayaan masyarakat
5	Pengembangan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif	Konsep wisata berkelanjutan 3C; conservasi, community, commodity
6	Pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan pemanfaatan wisata alam dan promosi/pemasaran wisata alam	Digitalisasi pengelolaan wisata alam e-ticketing, e-booking, e-report, promosi melalui media social dan website,

Secara lebih rinci, isu strategis pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang sedang dilakukan pembahasan baik internal Direktorat PJLKK maupun dengan Eselon I/ II lain serta Kementerian/ Lembaga lain, adalah:

1. Menyediakan mekanisme proses pembayaran E-Ticketing atau penyediaan platform pembayaran E-Ticketing yang bekerjasama dengan mitra
2. Mendorong percepatan penyusunan peraturan dan infrastruktur sebagai payung hukum pelaporan secara online (E-Report) dalam pelaporan jumlah pengunjung, pemenuhan kewajiban pemegang izin melalui aplikasi dan pelaporan serta penyetoran PNBP
3. Menerapkan CHSE dan menyediakan pelayanan kesehatan pada areal kegiatan wisata alam dengan sertifikasi ODTWA
4. Sertifikasi SDM Wisata Alam
5. Pengelolaan sampah di kawasan konservasi dalam bentuk zero waste zero accident, *clean up* sampah/sampah laut dan kerjasama pengelolaan sampah
6. Integrasi aktivitas dalam healing forest pada kawasan konservasi untuk mencapai keseimbangan 3 aspek kesehatan: *Spirit* (Jiwa), *Mind* (Pikiran) dan *Body* (Tubuh)
7. Transformasi Aplikasi Wisata Alam Indonesia
8. *Virtual Tour* Taman Nasional dan Taman Wisata Alam

Dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PJLKK dalam upaya pencapaian IKK ke-1 dapat terlihat pada gambar dibawah ini :



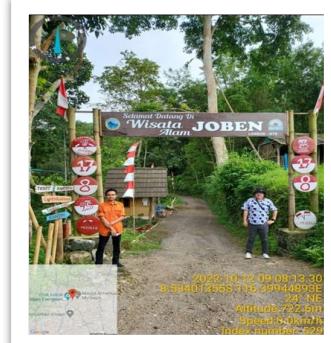
Gambar 10. Pembangunan checkpoint



Gambar 11. Fasilitas kuliner Joben, TN rinjani jalur pendakian Torean, TN rinjani



Gambar 12. Pengerjaan tracking Kalkun, TNGM



Gambar 13. Evaluasi kinerja PB PSWA PT Joben



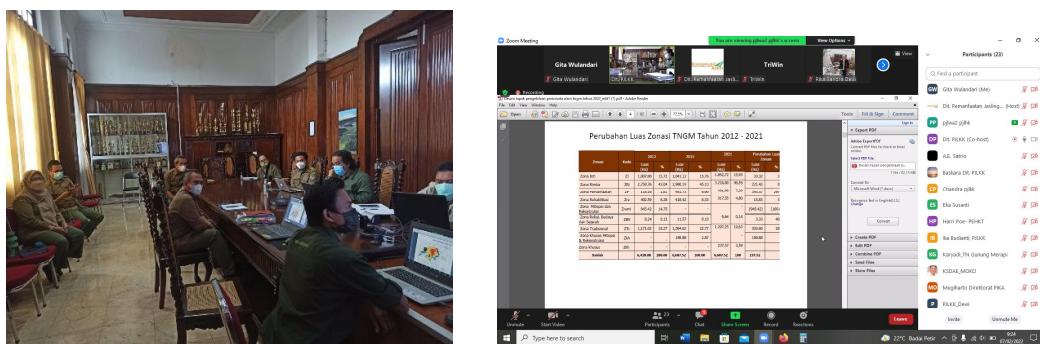
Gambar 14. Evaluasi PB-PSWA PT. Joben Evergreen di TN Gunung Rinjani



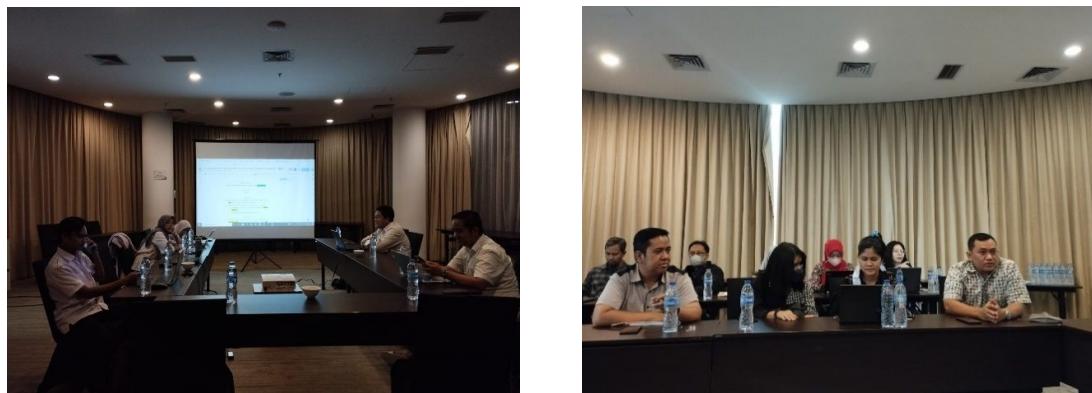
Gambar 15. Evaluasi PB-PSWA PT. Mitra Alam di TWA Tanjung Tampa, BKSDA NTB



Gambar 16. Bimbingan Teknis PB-PJWA di BBTN Bukit Barisan Selatan dan TN Karimunjawa



Gambar 17. Rapat Pembahasan Desain Tapak TN Gunung Merapi



Gambar 18. Rapat Pembahasan Rapermen Tematik Bidang PJLKK



Gambar 19. Workshop Peningkatan Promosi dan Pemasaran Wisata Alam di Pontianak, Kalimantan

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2

“Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon Sebanyak 40 Entitas Selama 5 tahun”

Direktorat PJLKK mempunyai tanggungjawab capaian yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon Sebanyak 40 Entitas Selama 5 tahun”. Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri dari 2 komponen, yaitu Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon. Penjelasan atas capaian kinerja dari masing-masing komponen tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi dan Karbon (entitas) Unit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Lokasi 2022	Target IKK 2022	Realisasi	% Realisasi
Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon (entitas) Unit pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi	7	7	7	100

Realisasi capaian IKK 2 jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam khususnya untuk Unit pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi diukur dengan membandingkan realisasi capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dengan target capaian Indikator Kinerja Tahun 2022. Untuk tahun 2022, realisasi capaian IKK jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi sebanyak 7 unit. Jika dibandingkan dengan target IKK tahun 2022 sebesar 7 unit, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 100 %. Capaian kinerja untuk kegiatan ini yaitu:

1. Hasil telaah & pengesahan dokumen RKT-PJLPB Tahun 2022 Star Energy Geothermal Salak, Ltd.
2. Hasil telaah & pengesahan dokumen RKT-PJLPB Tahun 2022 PT Indonesia Power
3. Hasil telaah & pengesahan dokumen RKT-PJLPB Tahun 2020 Star Energy Geothermal Darajat II, Limited
4. Hasil telaah & pengesahan dokumen RKT-PJLPB Tahun 2021 Star Energy Geothermal Darajat II, Limited

5. Hasil telaah & pengesahan dokumen RKT-PJLPB Tahun 2022 Star Energy Geothermal Darajat II, Limited
6. Telaah atas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kajian Eksosistem dan Keanekaragaman Hayati pada Area Prospek Panas Bumi di TWA Gunung Batur Bukit Payang
7. Usulan Jenis dan Tarif PNBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dalam Konsep Usulan Revisi PP 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.

Pada Tahun 2022, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi, didukung oleh anggaran sebesar Rp. 298.240.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 298.233.953,- atau 99,99%. Anggaran yang tersedia tersebut digunakan untuk kegiatan yang menunjang pencapaian IKK yaitu:

1. Penyusunan/Penyempurnaan NSPK Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnaan NSPK yang sudah ada dan menyusun NSPK yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi sebagai acuan dan arahan teknis.
2. Fasilitasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Kawasan Konservasi.
Kegiatan dilakukan untuk memberikan pendampingan kepada pemegang IPJLPB dan UPT/UPTD dalam upaya penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi di bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi.
3. Verifikasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi.
Kegiatan dilakukan dalam rangka menelaah rencana pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan/atau memberikan arahan kepada UPT/UPTD atas layanan perizinan terhadap permohonan yang diajukan oleh calon pemohon IPJLPB baik dari aspek administrasi maupun aspek teknis.
4. Koordinasi/Sinkronisasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di UPT/SKPD.
Kegiatan ini bertujuan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait di lapangan, mengupdate perkembangan terbaru rencana pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, serta menyamakan persepsi terkait kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi antara pemerintah pusat dengan UPT KemenLHK maupun UPTD dalam rangka pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi
5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Perizinan Jasa Lingkungan Panas Bumi.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam meningkatkan kinerja dan memastikan agar pemenuhan kewajiban operasionalisasi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi sesuai dengan dokumen rencana dan ketentuan perundang-undangan.
6. Supervisi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Kawasan Konservasi.
Kegiatan dilakukan untuk memberikan dukungan kebijakan bagi terselenggaranya tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi pada kawasan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sampai dengan tahun 2022, Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) yang telah terbit sebanyak 4 unit IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana disajikan pada tabel 17.

Tabel 17. Jumlah IPJLPB yang Terbit Sampai Tahun 2022

No.	Pemegang IPJLPB	Areal Kegiatan Usaha	Luas (Ha)	Kapasitas Terpasang	Surat Keputusan Pemberian IPJLPB
1.	PT. Pertamina Geothermal Energy – Chevron Geothermal Salak, Ltd.	Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	228,69	197 MW	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 1/1/IPJLPB/PMDN/2016 tanggal 12 Agustus 2016
2.	PT. Indonesia Power	Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	13,725	180 MW	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 1/1/IPJLPB/PMDN/2017 tanggal 17 Januari 2017
3.	PT. Pertamina Geothermal Energy	Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Kawah Kamojang, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat	56,85	235 MW	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 405/Menlhk/Setjen/KSA.3/6/2019 tanggal 28 Juni 2019
4.	Kontrak Operasi Bersama PT. Pertamina Geothermal Energy – Star Energy Geothermal Darajat II LTD	Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat	26	271 MW	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.635/Menlhk/Setjen/KSA.3/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019

Manfaat yang diperoleh dari 4 (empat) pemegang IPJLPB (PLTP dengan kapasitas pembangkit 883 MW) antara lain:

1. Diperkirakan dapat memasok listrik untuk 1 juta rumah tangga (900 watt/rumah) pada jaringan Jawa Madura dan Bali.
2. Menyerap tenaga kerja ± 1.969 orang.

3. Memasok listrik bagi Objek Vital Nasional yang terletak di sekitar Bogor (termasuk Istana Bogor dan *Commuter Line*).
4. Dana Pendukung Pengelolaan Kawasan sebesar ±Rp 2,8 Miliar/Tahun sebagai pemenuhan kewajiban untuk konservasi melalui kegiatan dirancang sesuai dengan potensi yang ada disekitar wilayah operasi dan kondisi kawasan, diantaranya untuk:
 - a. pemberdayaan masyarakat di dan sekitar kawasan konservasi;
 - b. perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi; dan
 - c. pelestarian keanekaragaman hayati.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi selain dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan tersedianya energi listrik, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi PNBP kepada Negara dari Iuran dan Pungutan Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada kawasan konservasi. Namun pengenaan PNBP kepada pemegang IPJLPB belum dapat dilaksanakan karena jenis dan besaran iuran dan pungutan tersebut belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. Direktorat PJLHK telah berhasil merumuskan besaran tarif iuran dan pungutan izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Saat ini draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut masih dalam tahap pembahasan ulang dengan Kementerian Keuangan dan K/L terkait sehubungan dengan terbitnya UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Beberapa isu penting yang masih perlu pembahasan baik internal Direktorat PJLKK maupun dengan Eselon I/ II lain serta Kementerian/ Lembaga lain, antara lain:

1. Finalisasi PermenLHK Tematik tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Konservasi.
2. Belum terdapat ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang rencana pelaksanaan kegiatan eksplorasi oleh Pemerintah (Kementerian ESDM).
3. Penarikan iuran dan pungutan bagi pemegang IPJLPB belum dapat dilakukan dikarenakan revisi PP Nomor 12 Tahun 2014 yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum terbit.
4. Penggunaan air sebagai penunjang kegiatan industri dalam pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi menjadi permasalahan yang harus segera mendapatkan solusi terkait dengan terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang melarang pendayagunaan sumber daya air di KSA dan KPA kecuali bagi orang perseorangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dimanfaatkan sebagai bentuk usaha.
5. Sebagian potensi panas bumi berada pada Kawasan *Tropical Rainforest Heritage of Sumatra* (TRHS) yang mencakup 3 taman nasional yaitu: TN Gn Leuser, TN Kerinci Seblat dan TN Bukit Barisan Selatan. Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan TRHS termasuk kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam

Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention karena masih dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan.

Dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PJLKK dalam upaya pencapaian IKK ke-2 komponen kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahun 2022 dapat terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 20. Pembahasan Dokumen RKT-PJLPB Star Energy Geothermal Darajat II, Limited



Gambar 21. Kegiatan Supervisi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Tahura R. Soerjo



Gambar 22. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Konservasi

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

Pada tahun 2022 target Indikator Kinerja Kegiatan ke-2 pada komponen pemanfaatan jasa lingkungan karbon sebanyak 2 entitas berupa laporan hasil kegiatan pembangunan plot ukur permanen dan pengambilan data penghitungan karbon sebagai bagian dari integrasi jasa lingkungan ke dalam stok karbon berbasis ekosistem di taman nasional. Adapun capaian kinerja untuk komponen kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan karbon tahun 2022 ditampilkan pada tabel 18.

Tabel 18. Capaian indikator kinerja tahun 2022 pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam untuk komponen pemanfaatan jasa lingkungan karbon

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	% Realisasi
Dokumen integrasi jasa lingkungan ke dalam stok karbon berbasis ekosistem di taman nasional	2 entitas/dokumen	1 entitas/dokumen	50 %

Indikator ini diukur dengan membandingkan antara realisasi/capaian entitas pemanfaatan jasa lingkungan karbon pada tahun 2022 dengan target yang telah diproyeksikan sebelumnya untuk tahun 2022 yaitu sebanyak 2 entitas. Pada tahun 2022 target capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) untuk komponen pemanfaatan jasa lingkungan karbon berupa tersusunnya laporan hasil kegiatan pembangunan plot ukur permanen (PUP) untuk penghitungan stok karbon dan penilaian jasa lingkungan berbasis ekosistem di Taman Nasional Gunung Ciremai. Target ini hanya tercapai 50% dikarenakan kegiatan pembangunan PUP untuk penghitungan stok karbon di Taman Nasional Manusela yang menjadi target lokasi capaik IKK tidak dapat terlaksana karena adanya pemotongan/penghematan anggaran tahun 2022 pada kegiatan terkait komponen pemanfaatan jasa lingkungan karbon.

Dengan demikian, capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) untuk komponen pemanfaatan jasa lingkungan karbon sampai dengan tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja Renstra Tahun 2020 – 2024 adalah sebagaimana digambarkan pada Tabel 19 dan gambar 23.

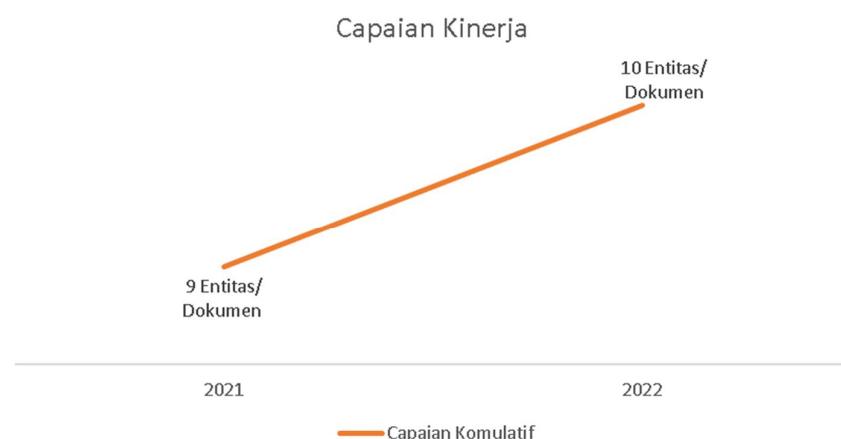
Tabel 19. Perbandingan Kenaikan/Penurunan komponen pemanfaatan jasa lingkungan karbon

Tahun	Target Capaian	Capaian s.d Tahun	% (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)	Kenaikan/ Penurunan
2020	4	0	0	
2021	5	9	+ 100%	

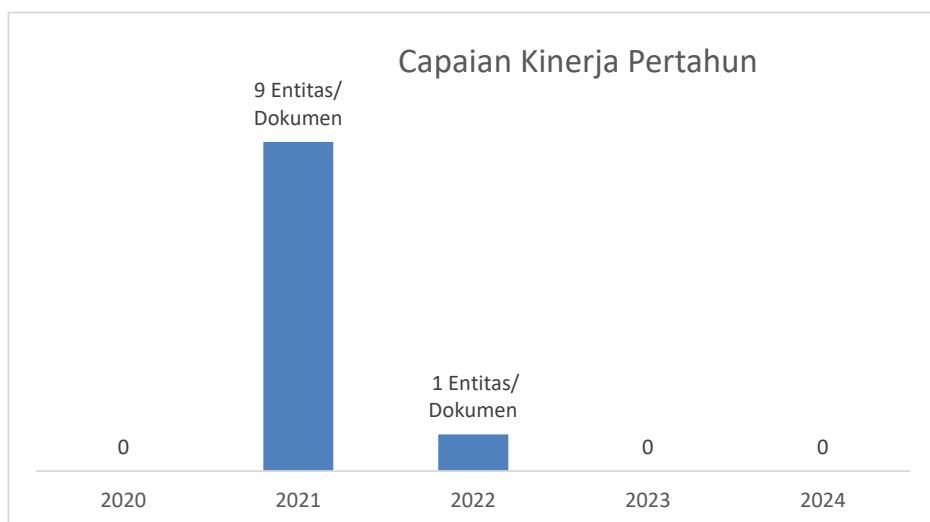
2022	2	10	+ 90,90%
2023	5	-	-
2024	4	-	-

Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun yaitu sebanyak 20 entitas, maka capaian IKK sampai dengan tahun 2022 telah tercapai sebanyak 10 entitas/dokumen atau telah tercapai sebesar 90,90 %. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 23.

Gambar 23. Perbandingan capaian komulatif indikator kinerja komponen pemanfaatan jasa lingkungan karbon tahun 2022 dibandingkan tahun 2020.



Sedangkan capaian target kinerja pertahun dapat diliha pada Gambar 24.



Gambar 24. Jumlah capaian indikator kinerja komponen pemanfaatan jasa lingkungan karbon tahun 2020 s.d 2022

Dalam pelaksanaannya, pengintegrasian jasa lingkungan ke dalam stok karbon berbasis ekosistem di taman nasional dilaksanakan dengan pendekatan participatory action research mulai dari tahapan pembentukan tim kerja, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di UPT melalui inhouse training pengukuran/penghitungan karbon dan penilaian jasa lingkungan, pengambilan data dan survei lapangan (fieldwork), konsinyasi analisis data dan penyusunan dokumen sampai dengan ekspos dan pengesahan dokumen integrasi. Keseluruhan tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan hingga tersusunnya dokumen integrasi jasa lingkungan ke dalam stok karbon berbasis ekosistem di taman nasional.

Dari tahapan-tahapan kerja/kegiatan tersebut, yang menjadi verifier hasil dari capaian kinerja IKK Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon Tahun 2022 yaitu tersedianya Laporan hasil Kegiatan Pembuatan Petak Ukur Permanen dan Pengambilan Data Penghitungan Stok Karbon berbasis Ekosistem di Taman Nasional Gunung Ciremai yaitu:

1. Terselenggaranya Peningkatan kapasitas pengelola kawasan hutan konservasi terkait integrasi jasa lingkungan melalui inhouse training dan simulasi penghitungan/pengukuran stok karbon dan penilaian jasa lingkungan di Taman Nasional;
2. Terbentuknya tim kerja integrasi jasa lingkungan ke dalam stok karbon berbasis ekosistem di Taman Nasional Gunung Ciremai;
3. Terbangunnya permanent sample plot (PSP) berbasis ekosistem di Taman Nasional Gunung Ciremai yaitu sebagai berikut :

Taman Nasional	Tipe Ekosistem	Jumlah Plot	Lokasi
Gunung Ciremai	Hutan Dataran Rendah Primer	18	Blok Ciayakan, Seksi Wilayah Kuningan
	Hutan Dataran Rendah Terdegradasi	18	Blok Bintangot, Seksi Wilayah Kuningan
	Hutan Sub Pegunungan Primer	18	Blok Agro, Seksi Wilayah Majalengka
	Hutan Sub Pegunungan Terdegradasi	18	Blok Sayangkaak, Wilayah Sayangkaak

4. Tersusunnya laporan hasil pembangunan plot sampel permanen dan pengambilan data/sampel penghitungan karbon di ekosistem dataran rendah dan ekosistem pegunungan bawah di Taman Nasional Gunung Ciremai. Adapun total sampel yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut :

Taman Nasional	Tipe Ekosistem	Jumlah Sampel
Gunung Ciremai	Hutan Dataran Rendah	Sampel Seresah, tumbuhan bawah, Semai dan Nekromas : 124 sampel Sampel kayu mati: 288 sampel Sampel tanah: 216 sampel
	Hutan Sub Pegunungan	Sampel Seresah, tumbuhan bawah, Semai dan Nekromas : 111 sampel Sampel kayu mati: 16 sampel Sampel tanah: 216 sampel

Dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia dalam pencapaian IKK Tahun 2022 ini, maka tahapan kegiatan Integrasi Jasa Lingkungan ke Dalam Stok karbon berbasis Ekosistem di Taman Nasional baru terlaksana sampai dengan tahap pembuatan petak ukur permanen dan pengambilan data penghitungan stok karbon berbasis ekosistem. Kegiatan akan dilanjutkan pada tahapan kegiatan selanjutnya yaitu analisis data penghitungan stok karbon dan penilaian jasa lingkungan sampai dengan penyusunan dokumen integrasi.

Pencapaian target indikator kinerja kegiatan untuk komponen kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan karbon, telah didukung dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 397.159.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 397.963.253,00 atau 100%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan penunjang IKK berupa pencapaian parameter target IKK, yaitu :

1. Sinkronisasi/Koordinasi Pemanfaatan jasa Lingkungan karbon di Kawasan Konservasi
2. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Konservasi
3. Inhouse Training dan Simulasi integrasi jasa Lingkungan ke dalam Karbon Hutan di Taman Nasional
4. Fasilitasi Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Konservasi
5. Supervisi/Konsinyasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Konservasi

Dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PJLKK dalam upaya pencapaian IKK ke-2 komponen kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan karbon tahun 2022 dapat terlihat pada gambar dibawah ini :





Gambar 25. Pengambilan data stok karbon di TN Gunung Ciremai

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3

Jumlah Perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Sebanyak 60 Izin Selama 5 Tahun

Kegiatan pengelolaan jasa lingkungan air adalah teknis pengelolaan jasa lingkungan air dan energi air mulai dari merencanakan, melaksanakan, memantau dan evaluasi serta pengendaliannya, dengan harapan untuk menjamin keamanan dan ketahanan sumber daya air itu sendiri. Ketahanan air (*water security*) adalah ketersediaan baik kuantitas maupun kualitas air untuk kehidupan, kesehatan, dan untuk keberlanjutan ekosistem itu sendiri. Ketersediaan air yang memadai baik kuantitas, kontinuitas dan kualitasnya dapat mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi. Hasil pencapaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja "Jumlah entitas pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Sebanyak 60 Izin selama 5 tahun" tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Pencapaian (entitas dan izin) 2022	Lokasi Target IKK 2022	Realisasi	% Realisasi
Jumlah entitas (izin) pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Sebanyak 60 Izin selama 5 tahun 1. NSPK 2. Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA), Surat Keputusan Dirjen KSDAE 3. Pengusahaan Pemanfaatan Air dan Energi Air (Hasil Monev) kriteria baik 4. Data izin air (unit)	10	1. BBKSDA Jatim 2. BKSDA Sulawesi Utara 3. BKSDA Sumatera Barat 4. BKSDA Sumatera Selatan 5. BKSDA Bengkulu 6. BKSDA Kalimantan Barat 7. TN Bukit Barisan Selatan 8. TN Kerinci Seblat 9. TN Bogani Nani Wartabone 10. TN Gunung Ciremai 11. TN Gunung Halimun Salak	Entitas 11 1. NSPK sebanyak 2 draft 2. PAPA sebanyak 3 SK Dirjen 3. Pemegang IUPA dan IUPEA berkinerja Baik sebanyak 6 Unit 4. Izin Pemanfaatan Air (IPA) terbit sebanyak 0 unit	110

Penjelasan atas capaian kinerja untuk komponen pemanfaatan jasa lingkungan air tahun 2022 pada Direktorat PJLKK dari target entitas sebanyak 10 entitas terialisasi sebanyak 11 entitas atau terealisasi sebesar 110%. Entitas Capaian kinerja untuk jasa lingkungan air tersebut berupa:

1. Norma Standar Prosedur Kegiatan (NSPK) sebanyak 2 draft NSPK:

- a. Tersusunnya draft NSPK Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tematik bidang Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi.
- b. Tersusunnya ddraft NSPK Revisi Peraturan Pemerintah Pendapatan Negara Bukan Pajak bidang Kehutanan (PP No. 12 Tahun 2014) bidang Jasa Lingkungan Air dan Energi Air.

2. Areal Penetapan Pemanfaatan Air dan Energi Air (PAPA)

Penetapan Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air pada tahun 2022 terealisasi sebanyak 3 unit PAPA :

- a. Balai KSDA Sulawesi Utara (TWA Gunung Ambang)
- b. Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laewangi Manggameti
- c. Balai TN Meru Betiri

3. Terlaksananya Pengusahaan Pemanfaatan Air dan Energi Air dengan kriteria Baik berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi

Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) Tahun 2022 dapat berjalan dengan baik sebanyak 6 pemegang izin usaha dari 17 pemegang izin usaha sebagaimana tabel 21 di bawah ini:

Tabel 21. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) Tahun 2022

No	Nama Pemegang Izin	Jenis Izin	Lokasi UPT	Operasional	Kriteria Hasil Evaluasi
1.	PT Brantas Cakarawala Energi	IUPEA	BBTN Kerinci Seblat	Beroperasi	Baik
2.	CV. Telaga Remis Jaya	IUPA	BTN Gunung Ciremai	Beroperasi	Baik
3.	CV. Jagaraga	IUPA	BTN Gunung Ciremai	Beroperasi	Baik
4.	CV. Tirta Mekar	IUPA	BTN Gunung Ciremai	Beroperasi	Baik
5.	PDAM Kab. Lumajang	IUPA	BBTN Bromo Tengger Semeru	Beroperasi	Baik
6.	CV Sun Palung Borneo	IUPA	BTN Gunung Palung	Beroperasi	Baik

7.	PT Kans Capital	IUPEA	BBKSDA Jawa Timur	Tahap Pembangunan	Sedang
8.	PT Bone Bolango Energi	IUPEA	BTN Bogani Nani Wartabone	Tahap Pembangunan	Sedang
9.	PT Energi Hidro Investama	IUPEA	BBTN Bukit Barisan Selatan	Belum Membangun (belum ada Kontrak dengan PLN)	Sedang
10.	PT Antamloka Halimun Energi	IUPEA	BTN Gunung Halimun Salak	Belum Membangun (belum ada Kontrak dengan PLN)	Sedang
11.	PT Halimun Banyu Energi	IUPEA	BTN Gunung Halimun Salak	Belum Membangun (belum ada Kontrak dengan PLN)	Sedang
12.	PT Remo Integrasi Sosusindo	IUPEA	BTN Matalawa	Belum Membangun (belum ada Kontrak dengan PLN)	Sedang
13.	PDAM Kab. Bone Bolango	IUPA	BTN Bogani Nani Wartabone	Beroperasi	Sedang
14.	PDAM Kab. Kolaka	IUPA	BKSDA Sulawesi Tenggara	Beroperasi	Sedang
15.	PDAM Kab. Kerinci	IUPA	BBTN Kerinci Seblat	Beroperasi	Sedang
16.	PDAM Kab. Kuningan	IUPA	BTN Gunung Ciremai	Beroperasi	Sedang
17.	PDAM Kota Sukabumi	IUPA	BBTN Gunung Gede Pangrango	Belum Beroperasi	Sedang

4. Data Perizinan Pemanfaatan Air dan Energi Air

Perizinan yang terbit pada tahun 2022 sebanyak 0 unit untuk pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air dikarenakan paska terbitnya UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, terdapat larangan pemanfaatan air dari KSA dan KPA pada pasal 33. Kemudian terbitnya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan terbitnya PermenLHK No 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mengakomodir perizinan pemanfaatan air pada kawasan konservasi, namun masih menunggu peraturan tematiknya yang masih dalam tahap penyusunan final. Sehingga perizinan pemanfaatan air dan energi air pada tahun 2022 masih belum dapat diterbitkan baik yang non komersil maupun komersil.

Manfaat kegiatan pemanfaatan air dan energi air dari kawasan konservasi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama pemanfaatan air dan energi air untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari akan air bersih, pengairan untuk pertanian, dan penerangan dari energi mikrohidro serta memberikan manfaat ke Negara berupa PNBP dan kelestarian alam.

Pencapaian target indikator kinerja kegiatan untuk komponen kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air, telah didukung dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 770.852.000 dan telah terealisasi sebesar 770.656.961 atau 99,97%. Dalam upaya capaian IKK Jumlah Perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 60 Izin selama 5 tahun dilaksanakan kegiatan pendukung dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan NSPK Jasa Lingkungan pada Kawasan Konservasi
2. Verifikasi, Fasilitasi dan Pembahasan Usulan Penetapan Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air
3. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air
4. Sinkronisasi dan Koordinasi Pemanfaataj Jasa Lingkungan Air
5. Pengawasan dan evaluasi pemegang izin usaha pemanfaatan air dan energi air

Dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PJLKK dalam upaya pencapaian IKK “Jumlah Perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 60 Izin selama 5 tahun” pada tahun 2022 dapat terlihat sebagaimana gambar berikut :



Gambar 26. Kegiatan Bimtek Jasling Air di TN Bromo Tengger Semeru



Gambar 27. Kegiatan Bimtek Jasling Air di BKSDA Bengkulu



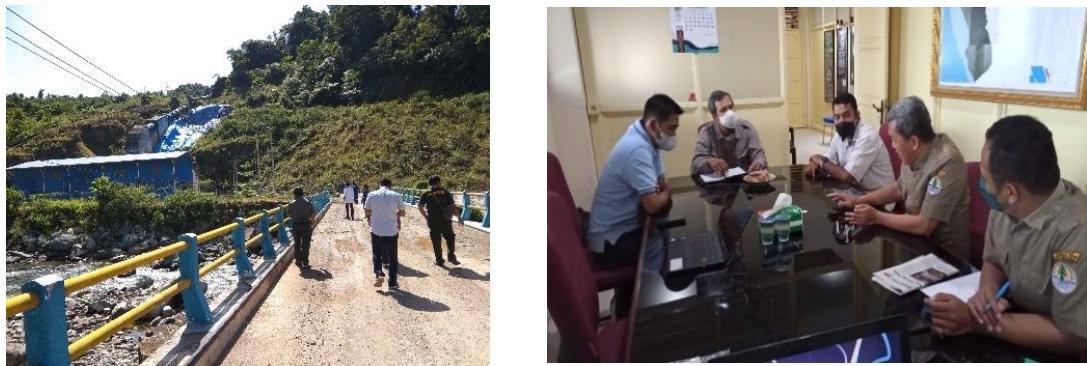
Gambar 28. Kegiatan Bimtek Jasling Air di TN Sulawesi Utara dan Penelaahan Usulan PAPA



Gambar 29. Kegiatan Penyusunan NSPK Permen Tematik dan PNBP Jasa Lingkungan pada Kawasan Konservasi



Gambar 30. Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi dengan DPRD Provinsi Bengkulu dan PERPAMSI



Gambar 31. Kegiatan Pengawasan Dan Evaluasi Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) PT Brantas Cakrawala Energi di BBTN Kerinci Seblat

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4

Jumlah Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education* Sebanyak 52 Destinasi Selama 5 Tahun

Salah satu upaya dalam mendukung agenda pembangunan nasional, mendukung tercapainya tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dan mendukung program KSDAE, Direktorat PJLKK berkontribusi dalam Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah destinasi wisata alam *Science, Academic, Voluntary, Education* (SAVE) sebanyak 52 destinasi selama 5 tahun" dengan capaian tahun 2022 pada 7 target lokasi destinasi ditampilkan pada tabel 20. Adapun Target lokasi 7 Destinasi tersebut adalah 1) TN Komodo 2) TN Baluran 3) TN Alas Purwo 4) TWA Kamojang Papandayan 5) Hutan Pendidikan Wanagama 6) TN Gunung Leuser 7) KHDTK Aek Nauli. Hasil pencapaian kinerja tahun 2022 atas kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 22.

Tabel 22. Capaian indikator kinerja tahun 2022 Jumlah destinasi wisata alam SAVE minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK 2022	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah destinasi wisata alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> (Destinasi)	7 Destinasi	7 Destinasi	100 %

Indikator ini diukur dengan membandingkan parameter dalam destinasi wisata alam *Science, Academic, Voluntary, Education* (SAVE) berupa:

- a. Tersedianya Areal Pemanfaatan Wisata Alam di Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis berupa penyusunan desain tapak dan masterplan; dan kegiatan dari pusat yaitu pengesahan desain tapak dan masterplan. Masing-masing kegiatan dengan target 7 destinasi SAVE pada tahun 2022.
- b. Tersedianya Kelembagaan Pengembangan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis yaitu pemberian izin IUPJWA; dan kegiatan dari pusat berupa peningkatan kapasitas pemegang izin IUPJWA, pemberian sertifikasi pemegang izin IUPJWA, pengesahan dokumen RPPA dan bimbingan teknis pengusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi. Masing-masing kegiatan dengan target 7 destinasi SAVE pada tahun 2022.
- c. Efektifitas Pemanfaatan Wisata Alam dalam Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis berupa penilaian kinerja pemegang IUPJWA dan kegiatan dari pusat yaitu evaluasi kinerja pemegang IUPSWA. Masing-masing kegiatan dengan target 7 destinasi SAVE pada tahun 2022.
- d. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis berupa pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana wisata alam dan kegiatan dari pusat berupa pengesahan FS dan DED dan supervisi pembangunan sarana dan prasarana wisata alam. Masing-masing kegiatan dengan target 7 destinasi SAVE pada tahun 2022.

Tabel 23. Parameter Capaian IKK "Jumlah destinasi wisata alam SAVE minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun" pada tahun 2022

No.	Parameter	Uraian
1	Tersedianya Areal Pemanfaatan Wisata Alam di Kawasan Konservasi	Desain tapak TWA Kamojang Papandayan sudah disahkan. Kemudian, pada tahun 2022, prakondisi kawasan berupa pengesahan 2 dokumen desain tapak di Taman Nasional Gunung Leuser dan penyusunan Masterplan Pengembangan Wisata Alam di TN Baluran.
2	Kelembagaan Pengembangan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> Terbitnya 5 jenis usaha PB-PJWA di Taman Nasional Komodo. Terbitnya perpanjangan izin definitive PB-PSWA PT Wana Wisata Alam Hayati di TN Alas Purwo
3	Terselenggaranya Efektifitas Pemanfaatan Wisata Alam dalam Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi 4 unit PB-PSWA dengan rincian 3 unit di Taman Nasional Komodo dan 1 unit di Taman Nasional Alas Purwo Monitoring rutin pembangunan sarpras di 7 destinasi
4	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Konservasi	Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana wisata alam pada 4 destinasi

Uraian parameter yang pertama yaitu tersedianya Areal Pemanfaatan Wisata Alam di Kawasan Konservasi. Pada tahun 2022, 22 pengesahan prakondisi Kawasan berupa Desain Tapak telah dilaksanakan. Dari 22 pengesahan desain tapak tersebut, terdapat 2 dokumen pengesahan desain tapak yang termasuk ke dalam lokasi target Indikator Kinerja Kegiatan pada "Jumlah destinasi wisata alam SAVE minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun" yang berada di Taman Nasional Gunung Leuser dengan rincian sebagai berikut:

1. Desain Tapak Zona Pemanfaatan Selang Pangeran dan Sikundur, TN Gunung Leuser No. SK. 40/PJLKK/PJLWAKK/KSA.3/6/2022 tanggal 29 Juni 2022
2. Desain Tapak Zona Pemanfaatan Gunung Kemiri, TN Gunung Leuser. SK. 69/PJLKK/PJLWAKK/KSA.3/12/2022 tanggal 29 Desember 2022.

Uraian parameter yang kedua yaitu Kelembagaan Pengembangan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi. Pada tahun 2022, terdapat 5 jenis usaha PB-PJWA pada Kawasan konservasi yang termasuk ke dalam lokasi target Indikator Kinerja Kegiatan pada "Jumlah destinasi wisata alam SAVE minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun" yang berlokasi di Taman Nasional Komodo. Unit PB-PJWA yang berlokasi di Taman Nasional Komodo tersebut berbentuk Badan Usaha (Swasta) atas nama PT Flobamor dengan jenis usaha penyediaan jasa wisata alam berupa transportasi, pramuwisata, perjalanan wisata, makanan dan minuman, serta informasi wisata. Sedangkan untuk PB-PSWA, pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) perpanjangan izin definitive PB-PSWA di Kawasan konservasi yang termasuk ke dalam lokasi target Indikator Kinerja Kegiatan pada "Jumlah destinasi wisata alam SAVE minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun" yang berlokasi di Taman Nasional Alas Purwo. 1 (satu) perpanjangan izin definitive PB-PSWA tersebut atas nama PT Wana Wisata Alam Hayati sebagaimana sesuai dengan

terbitnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 91201047413110004 tanggal 7 Juli 2022 dengan masa berlaku dari tahun 2022 s.d. tahun 2042.

Uraian parameter yang ketiga yaitu terselenggaranya efektifitas pemanfaatan wisata alam dalam kawasan konservasi. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan penilaian efektivitas pemanfaatan wisata alam di Kawasan Konservasi melalui kegiatan evaluasi kinerja pemegang PB-PSWA yang dilaksanakan pada 25 unit PB-PSWA. Dari 25 unit PB-PSWA tersebut, 4 unit diantaranya termasuk ke dalam lokasi target Indikator Kinerja Kegiatan pada "Jumlah destinasi wisata alam SAVE minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun" dengan rincian sebagai berikut.

1. 3 (tiga) unit PB-PSWA di Taman Nasional Komodo atas nama PT Synergindo Niagatama, PT. Komodo Wildlife Ecotourism, dan PT Segara Komodo Lestari. Pemegang izin PB-PSWA atas nama PT Synergindo Niagatama yang termasuk ke dalam klaster kinerja pada non lampiran mendapatkan nilai akhir 135 pada hasil evaluasi kinerja pemegang PB-PSWA. Sedangkan untuk PT. Komodo Wildlife Ecotourism dan PT Segara Komodo Lestari yang termasuk ke dalam klaster kinerja pada lampiran III masing-masing mendapatkan nilai akhir sebesar 107 untuk PT. Komodo Wildlife Ecotourism dan -69 untuk PT Segara Komodo Lestari. Pada kedua PT tersebut baik PT. Komodo Wildlife Ecotourism maupun PT Segara Komodo Lestari masing-masing tidak melaksanakan progres atas komitmen 6 bulan sebelumnya (Maret s.d Agustus 2022) sehingga persentase atas evaluasi komitmen 6 bulan (Maret s.d Agustus 2022) adalah sebesar 0%. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut tindak lanjut yang diambil adalah Surat Dirjen KSDAE kepada PT. Komodo Wildlife Ecotourism dan PT Segara Komodo Lestari untuk segera melakukan penyusunan EIA.
2. 1 (satu) unit PB-PSWA di Taman Nasional Alas Purwo atas nama PT. Wanasari Pramudita Ananta. PT Wanasari Pramudita Ananta tersebut merupakan pemegang izin PB-PSWA yang masuk ke dalam klaster kinerja non lampiran dengan mendapatkan skor akhir atas evaluasi kinerja pemegang PB-PSWA sebesar 384 atau termasuk ke dalam kategori sedang.

Uraian parameter yang keempat yaitu pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di Kawasan Konservasi. Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di Kawasan Konservasi menjadi upaya dalam mendukung pengembangan wisata alam pada destinasi wisata alam science, academic, voluntary, education (SAVE). Pada tahun 2022, pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di Kawasan Konservasi dilaksanakan pada 4 lokasi sebagai upaya dalam mendukung pengembangan wisata alam pada destinasi wisata alam science, academic, voluntary, education (SAVE). Secara lengkap, rincian data Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 24.

Tabel 24. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Tahun 2022

No.	Lokasi Target	Uraian
1	TN Baluran	<p>Realisasi 86%</p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Masterplan Pengembangan Wisata Alam • Kajian Willingness to Pay dan Enjoyment • Penyusunan Roadmap Penelitian di Taman Nasional Baluran • Pembangunan Tower Pantau di Savana Bekol • Pembuatan video pendek promosi wisata alam • Renovasi Kantor Resort Watunumpuk • Penataan Halaman Kantor Seksi II Karangtekok • Pencetakan tiket masuk • Pencetakan leaflet, booklet dan banner • Pembuatan papan informasi • identifikasi dan karakteristik sampah dari kegiatan wisata alam • Pembangunan Gerbang Tiket Masuk TN Baluran • Pemeliharaan Jalur Interpretasi oleh Masyarakat di SPTN Wilayah II Karangtekok • Pemeliharaan Jalur Interpretasi oleh Masyarakat di SPTN Wilayah I Bekol
2	Hutan Pendidikan Wanagama	<p>Realisasi 98,3 %</p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Peralatan Camping Ground Hutan Wanagama • Pengadaan Bantuan Alat Transportasi Pendukung Camping Ground • Review DED Eco Edu Forest Hutan Wanagama • Pembangunan Sarpras Camping Ground Hutan Wanagama • Pengawasan Pembangunan Sarpras Camping Ground Hutan Wanagama
3	TN Gunung Leuser	<p>Realisasi 100 %</p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Pos Perencanaan Pembangunan Kios Usaha Masyarakat • Pembangunan Kios Usaha Masyarakat • Pengawasan Pembangunan Kios Usaha Masyarakat • Perencanaan Pos Jaga Gunung Kemiri • Fisik Pos Jaga Gunung Kemiri • Pengawasan Pos Jaga Gunung Kemiri
	TWA Kamojang-papandayan	NIHIL
	TN Komodo	NIHIL
	TN Alas Purwo	Automatic Adjustment
4	KHDTK Aek Nauli	<p>Realisasi 100%</p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Jembatan Aek Nauli Elephant Conservation Camp/ANECC • Belanja Fisik Perencanaan Renovasi Jembatan Aek Nauli Elephant Conservation Camp/ANECC

No.	Lokasi Target	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Deck View Aek Nauli Elephant Conservation Camp/ANECC • Belanja Fisik Perencanaan Renovasi Deck View Aek Nauli Elephant Conservation Camp/ANECC • Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Renovasi Deck View Aek Nauli Elephant Conservation Camp/ANECC • Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lingkup Bidang KSDA Wilayah II /Kantor Pengelola wisata

Dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PJLKK dalam upaya pencapaian IKK ke-4 tahun 2022 dapat terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 32. Pembangunan Kios Usaha Masyarakat Di Rantau Sialang TN Gunung Leuser dan Pembangunan Tower Savana Bekol, di TN Baluran



Gambar 33. Evaluasi Kinerja PB-PSWA di PT. Komodo Wildlife Ecotourism

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-5

Jumlah Destinasi Wisata Alam Bahari Sebanyak 7 Destinasi Selama 5 Tahun

Salah satu upaya dalam mendukung agenda pembangunan nasional, mendukung tercapainya tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dan mendukung program KSDAE, Direktorat PJLKK berkontribusi dalam Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah destinasi wisata alam *bahari* sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun" dengan capaian tahun 2022 ditampilkan pada tabel 23. Adapun Target lokasi 3 Destinasi tersebut adalah 1) TN Bunaken, 2) TN Wakatobi dan 3) TN Takabonerate.

Tabel 25. Capaian indikator kinerja tahun 2022 Jumlah destinasi wisata alam Bahari minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK 2022	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah destinasi wisata alam Bahari (Destinasi)	3 Destinasi	3 Destinasi	100%

Indikator ini diukur dengan membandingkan parameter dalam destinasi wisata alam bahari berupa:

1. Tersedianya Areal Pemanfaatan Wisata Alam di Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis berupa penyusunan desain tapak dan *masterplan*; dan kegiatan dari pusat yaitu pengesahan desain tapak dan *masterplan*. Masing-masing kegiatan dengan target 3 destinasi bahari.
2. Tersedianya Kelembagaan Pengembangan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis yaitu pemberian izin IUPJWA; dan kegiatan dari pusat berupa peningkatan kapasitas pemegang izin IUPJWA, pemberian sertifikasi pemegang izin IUPJWA, pengesahan dokumen RPPA dan bimbingan teknis pengusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi. Masing-masing kegiatan dengan target 3 destinasi bahari.
3. Efektifitas Pemanfaatan Wisata Alam dalam Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis berupa penilaian kinerja pemegang IUPJWA dan kegiatan dari pusat yaitu evaluasi kinerja pemegang IUPSWA. Masing-masing kegiatan dengan target 3 destinasi bahari.
4. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Konservasi, dengan kegiatan dari unit pelaksana teknis berupa pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana wisata alam dan kegiatan dari pusat berupa pengesahan FS dan DED dan supervisi pembangunan sarana dan prasarana wisata alam. Masing-masing kegiatan dengan target 3 destinasi bahari.

Realisasi tahun 2022 adalah sebanyak 3 destinasi, dengan persentase 100%. Adapun 3 destinasi tersebut adalah TN Bunaken, TN Wakatobi dan TN Takabonerate. Realisasi pada 3 destinasi tersebut tersaji pada tabel 26.

Tabel 26. Parameter Capaian IKK “Jumlah destinasi wisata alam Bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun” pada tahun 2022

No.	Parameter	Uraian
1	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Konservasi	Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana wisata alam sebanyak 3 destinasi yaitu TN Wakatobi, TN Bunaken, dan TN Takabonerate

Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana wisata alam menjadi upaya dalam tersedianya sarana prasarana penunjang wisata alam. Tahun 2022, terdapat 3 destinasi bahari yang menyampaikan laporan pengadaan/pembangunan sarpras wisata alam,yaitu pada TN Wakatobi, TN Bunaken, TN Takabonerate. Secara lengkap, rincian data Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 27.

Tabel 27. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Tahun 2022

No.	Lokasi Target	Uraian
1	TN Wakatobi	<p><i>Realisasi 100%</i></p> <p>Kegiatan yang dilakukan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan bangunan pelayanan pengunjung • Pengadaan peralatan selam, pelengkapan gues house,perlengkapan bangunan pelayanan pengunjung
2	TN Bunaken	<p><i>Realisasi 100%</i></p> <p>Kegiatan yang dilakukan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Kapal (Pelang) Pengawasan Wisata • Pembayaran Pengadaan Mesin Kapal Pengawas • Administrasi Pokja Pengadaan
3	TN Takabonerate	<p><i>Realisasi 95%</i></p> <p>Kegiatan yang dilakukan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Wisma/Bungalow Tinabo

Dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PJLKK dalam upaya pencapaian IKK ke-4 tahun 2022 dapat terlihat pada gambar dibawah ini :



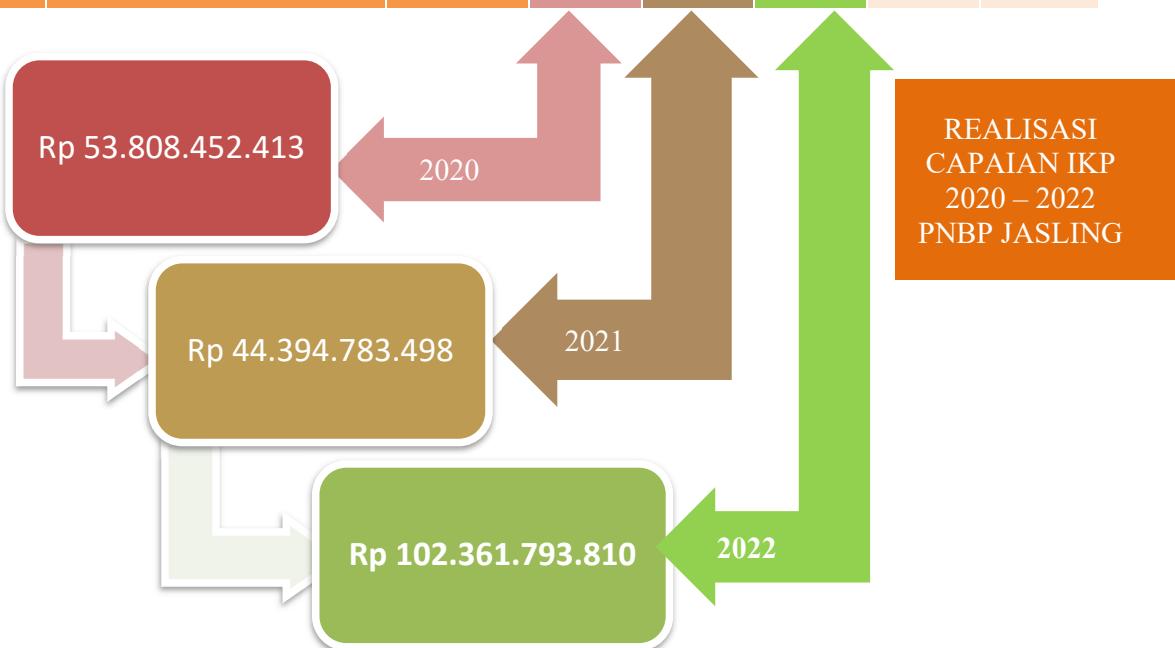
Gambar 34. Pembangunan Pondok Kerja Isenebuai di TN teluk Cenderawasih

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA BIDANG PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI

Capaian output Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari.

Gambar 34. Basline Indikator Kinerja Program pada "Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasling KK dan TSL.

NO	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2020 – 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	Miliar Rupiah	200	410	630	860	1.100



Pendapatan PNBP jasa lingkungan berasal dari beberapa jenis pungutan yang disajikan secara rinci beserta besarannya pada tabel berikut:

Tabel 28. Realisasi PNBP pada Jasa Lingkungan Tahun 2020 – 2022

No	Jenis PNBP	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Pungutan masuk obyek wisata alam (MOWA)	45.639.124.250	34.219.489.000	96.054.015.000

2	Pungutan Hasil Usaha Penyediaan saran wisata alam	662.537.097	132.731.145	129.029.898
3	Pungutan hasil usaha pemanfaatan jasa wisata alam	-	12.600.000	13.400.000
4	Pungutan usaha pemanfaatan air	187.291.066	419.563.353	439.167.428
5	Pungutan usaha pemanfaatan energi air	-	-	242.381.484
6	Iuran izin usaha penyediaan sarana wisata alam	7.319.500.000	9.607.400.000	6.483.300.000
7	Iuran izin usaha penyediaan jasa wisata alam	-	3.000.000	500.000
8	Iuran izin usaha pemanfaatan energi air	-	-	-
	Jumlah	53.808.452.413	44.394.783.498	102.361.793.810

Pembayaran pungutan PNBP pada Tahun 2020 – 2021 yang belum terbayarkan dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

1. Pungutan usaha pemanfaatan energi air, baru terbitnya izin beroperasi perusahaan di Tahun 2020, sehingga pembayaran pungutan baru terbayarkan di Tahun 2021.
2. Iuran izin usaha pemanfaatan energi air, terbitnya UU no.17 tahun 2019 tentang sumber daya air, sehingga proses pembayaran iuran tidak dapat diterapkan.

B. Realisasi Anggaran

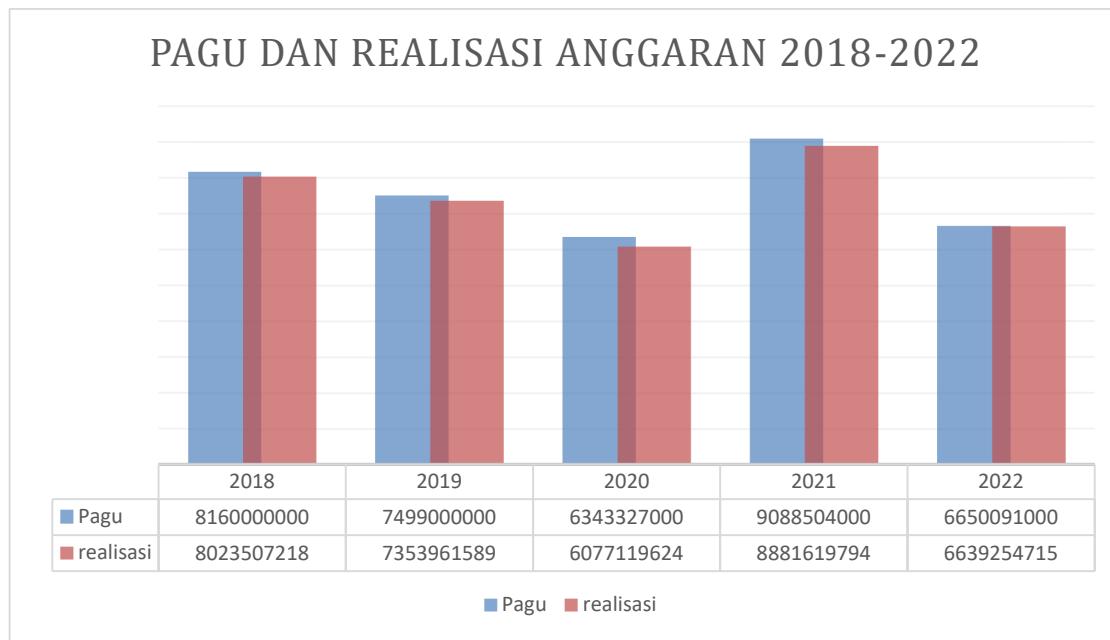
Dalam melaksanakan seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, Direktorat PJLKK telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, Direktorat PJLKK di dukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN Bagian Anggaran 029 sebesar Rp 6.650.091.000 dengan realisasi anggaran berdasarkan OM-SPAN sebesar Rp 6.639.254.715 atau 99,84 %.

Gambaran selengkapnya perkembangan dan realisasi anggaran Direktorat PJLKK Tahun 2018-2022 tersaji pada tabel 29.

Tabel 29. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Direktorat PJLKK Tahun 2018-2022.

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Percentase Realisasi (%)
2018	8.160.000.000	8.023.507.218	98,33
2019	7.499.000.000	7.353.961.589	98,07
2020	6.343.327.000	6.077.119.624	95,80
2021	9.088.504.000	8.881.619.794	97,73
2022	6.650.091.000	6.639.254.715	99,84

Secara diagram perkembangan anggaran dan realisasi anggaran Direktotrat PJLKK tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar 35.



Gambar 35. Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat PJLKK Tahun 2018-2022.

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, realisasi anggaran tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi kenaikan persentase penyerapan anggaran, yaitu sebesar 2.11%. besaran anggaran di Tahun 2022 terlihat lebih sedikit dikarenakan adanya Automatic Ajustment (AA) dan besaran anggaran HLN FIP-1.

Anggaran Direktorat PJLKK tahun 2022 digunakan untuk membiayai 5 IKK atau 2 output pada DIPA sesuai Perjanjian Kinerja. Adapun alokasi anggaran dan realisasi anggaran perkegiatan Direktorat PJLKK tahun 2022 sebagaimana table 30.

Tabel 30. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Per-kegiatan Direktorat PJLKK Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi	
			Keuangan (Rp.)	%
5423.001	Dokumen Kebijakan	1.867.779.000	1.867.067.873	99.96
5423.002	Dokumen Kebijakan	1.588.812.000	1.588.509.000	99.98
5419.962 + 994	Dukungan Manajemen dan Operasional Kantor	1.794.500.000	1.785.492.959	99.50
5423.BDB	Forest Investment Program - Project 1 (FIP-1)	1.099.000.000	1.098.285.337	99.93
(951+971)	Belanja Modal	300.000.000	299.899.430	99.97
JUMLAH				99.84

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian anggaran adalah sebesar 99,84 %. Walaupun realisasi penyerapan anggaran tinggi, tetapi ke depan tetap perlu diperhatikan upaya untuk meminimalisir permasalahan, yaitu:

- 1) Membuat tata waktu pelaksanaan kegiatan dan ketepatan waktu pelaksanaan serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan komunikasi internal dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan.
- 3) Mengintensifkan pengawasan internal oleh tim SPI dalam rangka mencapai tertib administrasi keuangan dan kegiatan.

Target capaian output kegiatan Direktorat PJLKK yaitu 31 Rekomendasi Kebijakan terdiri dari 11 Rekomendasi Kebijakan untuk capaian output 5423.ABV.001 Kebijakan Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan dan 20 Rekomendasi Kebijakan untuk capaian output 5423.ABV.002 Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan. Berdasarkan penilaian kinerja anggaran yang bersumber dari aplikasi SMART-DJA Realisasi Volume Keluaran (RVK) 31 Rekomendasi Kebijakan dengan persentase 100 % untuk Klasifikasi Rincian Output (KRO) 5423.ABV Kebijakan Bidang Kehutanan dan Realisasi 1 Kegiatan dengan persentase 100% untuk KRO 5423.BDB kegiatan Forest Investment Program – Project 1 (FIP-1).

Realisasi Anggaran UPT pada Kegiatan PJLKK

Realisasi anggaran UPT bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi telah dicapai pada tahun 2022 berdasarkan Online monitoring sistem perpendaharaan dan anggaran Negara (OMSPAN) tanggal 9 Januari 2023, dengan besaran alokasi pagu Rp

52.615.269.000 dan total realisasi secara keseluruhan sebesar Rp 51.942.951.710 atau sebesar 98,72%.

Tabel 31. Realisasi Anggaran UPT target capaian bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	Balai TN Tambora	1.204.277.000	1.200.584.325	99,69
2	Balai KSDA DKI Jakarta	66.929.000	66.860.500	99,90
3	Balai Besar KSDA Jawa Barat	1.683.147.000	1.599.005.034	95,00
4	Balai Besar KSDA Jawa Timur	529.250.000	517.644.993	97,81
5	Balai KSDA Jawa Tengah	150.000.000	144.576.500	96,38
6	Balai TN Baluran	1.060.190.000	1.043.289.266	98,41
7	Balai KSDA NAD	324.645.000	323.580.270	99,67
8	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	1.471.337.000	1.468.890.520	99,83
9	Balai KSDA Sumatera Barat	380.240.000	375.445.749	98,74
10	Balai Besar KSDA Riau	1.533.713.000	1.528.761.075	99,68
11	Balai KSDA Jambi	124.100.000	124.095.139	100
12	Balai KSDA Sumatera Selatan	530.000.000	526.288.078	99,30
13	Balai Besar TN Betung Kerihun-Danau Sentarum	3.963.200.000	3.559.126.514	89,80
14	Balai KSDA Kalimantan Barat	1.727.500.000	1.686.166.360	97,61
15	Balai TN Tanjung Puting	477.364.000	472.264.388	98,93
16	Balai KSDA Kalimantan Selatan	367.160.000	361.091.000	98,35
17	Balai Taman Nasional Kutai	81.000.000	80.634.760	99,55
18	Balai KSDA Sulawesi Utara	145.839.000	145.558.630	99,81
19	Balai KSDA Sulawesi Tengah	150.000.000	149.577.728	99,72
20	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	500.000.000	493.932.038	98,79
21	Balai KSDA Sulawesi Tenggara	81.500.000	81.500.000	100

22	Balai KSDA Maluku	150.000.000	150.000.000	100
23	Balai KSDA Bali	225.000.000	220.996.631	98,21
24	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat	1.075.476.000	1.071.440.164	99,62
25	Balai KSDA Bengkulu	100.000.000	98.564.600	98,56
26	Balai Besar TN G Gede Pangrango	533.764.000	533.670.372	99,98
27	Balai Besar TN Gunung Leuser	1.122.347.000	1.050.974.084	93,64
28	Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan	191.500.000	182.157.112	95,12
29	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	70.277.000	70.277.000	100
30	Balai TN Komodo	2.711.285.000	2.693.943.272	99,36
31	Balai Besar KSDA Papua	117.720.000	117.477.099	99,79
32	Balai Besar KSDA Papua Barat	1.277.134.000	1.274.495.713	99,79
33	Balai TN Kayan Mentarang	150.000.000	150.000.000	100
34	Balai TN Ujung Kulon	150.000.000	149.277.328	99,52
35	Balai TN Bogeninani Wartabone	177.500.000	177.450.000	99,97
36	Balai TN Bali Barat	4.811.875.000	4.701.009.562	97,70
37	Balai TN Sebangau	150.000.000	148.138.090	98,76
38	Balai KSDA Kalimantan Tengah	2.000.000	1.998.150	99,91
39	Balai KSDA Kalimantan Timur	400.000.000	399.066.561	99,77
40	Balai Besar TN Kerinci Seblat	389.157.000	380.20.597	97,70
41	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru	1.418.095.000	1.411.138.901	99,51
42	Balai TN Batang Gadis	50.000.000	49.207.700	98,42
43	Balai TN Tesso Nilo	67.142.000	66.470.000	99,0
44	Balai TN Bukit 12	47.100.000	45.830.000	97,30
45	Balai TN Gunung Ciremai	444.176.000	442.830.575	99,70

46	Balai TN Merapi	1.386.950.000	1.364.015.508	98,35
47	Balai TN Merbabu	989.208.000	973.847.217	98,45
48	Balai TN Matalawa	150.000.000	148.570.000	99,05
49	Balai TN Kep. Togean	20.000.000	20.000.000	100
50	Balai TN Bantimurung Bulusaraung	1.643.500.000	1.638.653.776	99,71
51	Balai TN Aketajawe Lolobata	63.850.000	63.819.069	99,95
52	Balai TN Lorentz	150.000.000	149.996.300	100
53	Balai TN Meru Betiri	130.400.000	130.398.679	100
54	Balai TN Way Kambas	77.664.000	77.649.260	99,98
55	Balai Besar TN Lore Lindu	75.000.000	74.987.400	99,98
56	Balai TN Alas Purwo	1.256.672.000	1.223.849.410	97,47
57	Balai TN Bunaken	777.480.000	776.231.000	99,84
58	Balai TN Kep. Seribu	120.300.000	119.475.775	99,31
59	Balai Besar TN Teluk Cinderawasih	1.293.610.000	1.292.542.028	99,92
60	Balai TN Gunung Halimun Salak	464.000.000	459.656.021	99,06
61	Balai TN karimunjawa	485.223.000	484.555.050	99,86
62	Balai TN Wasur	150.000.000	148.226.850	98,82
63	Balai TN Siberut	0	0	0
64	Balai TN Berbak Sembilang	28.620.000	28.305.800	98,90
65	Balai TN Rawa Aopa Watumohai	13.500.000	13.500.000	100
66	Balai TN Kelimutu	1.482.151.000	1.481.299.646	99,94
67	Balai TN Wakatobi	494.400.000	494.394.390	100
68	Balai TN GUnung Palung	149.231.000	149.062.940	99,89
69	Balai TN Takabonerate	786.620.000	786.480.900	99,98
70	Balai TN Bukit Tigapuluh	150.000.000	149.699.000	99,80
71	Balai TN Manusela	150.000.000	150.000.000	100
72	Balai TN Bukit Baka Bukit Raya	90.350.000	90.261.350	99,90

73	Balai TN Gunung Rinjani	1.705.410.000	1.693.276.387	99,29
74	Balai KSDA DIY	1.393.600.000	1.390.651.333	99,79

Sumber: Online monitoring sistem pertabendaharaan dan anggaran Negara (OMSPAN)-9 Januari 2022

Kendala yang dihadapi oleh UPT target Sebagian besar dikarenakan berkurangnya anggaran akibat pencadangan (Automatic Ajusment) sehingga perencanaan capaian tidak berbanding lurus dengan hasil pelaksanaan. Namun, Sebagian besar UPT target telah memaksimalkan anggaran yang tersisa untuk memenuhi target capaian IKK pada bidang pemanfaatan jasa lingkungan. Selain itu masih terdapat beberapa UPT yang capaian realisasinya masih di bawah 90% atau tidak tercapai sama sekali, tentunya hal ini akan menjadi perhatian dan evaluasi kendala internal peyerapan anggaran di masing-masing UPT target.

PENUTUP

Laporan kinerja (LKJ) Direktorat PJLKK Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban atas capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat PJLKK serta keuangan menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PJLKK Tahun 2020 – 2024. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE.

Laporan ini sebagai capaian kinerja tahun ke- 3 dari pelaksanaan Renstra 2020-2024. Sebagai pengelola pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi telah berhasil mencapai kinerja, hal ini dapat dilihat pada capaian 5 IKK, namun pada capaian IKK 2 tidak sesuai dengan target karena adanya pencadangan anggaran (Automatic Ajusment) yang terjadi di TN Manusela sebagai lokasi target jasling karbon. Tetapi secara keseluruhan capaian telah terlaksana.

Tingkat keberhasilan atas 5 IKK Tahun 2022 dapat disimpulkan:

1. Capaian Indikator kurang dari target sebanyak 1 IKK atau sebesar 20%,
2. Capaian Indikator sesuai atau lebih dari target sebanyak 4 IKK atau sebesar 80%.

Capaian IKK Direktorat PJLKK Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Jumlah Destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 Destinasi telah tercapai 100%, namun pengembangan destinasi akan terus dilaksanakan sampai tahun 2024.
2. Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam yang terbagi menjadi 2 IKK untuk Tahun 2023-2024:
 - Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon sebanyak 25 entitas yang terakumulasi dari Tahun 2020 -2022 dengan target sebanyak 40 entitas,
 - Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 59 entitas yang terakumulasi dari tahun 2020-2022 dengan target sebanyak 60 entitas.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas, fungsi, dan kinerja Direktorat PJLKK. Untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi perlu adanya sosialisasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi pada UPT sebagai pelaksana dan Direktorat PJLKK sebagai pembuat kebijakan perlu membuat keputusan atau tindaklanjut dan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh UPT agar capaian kinerja IKK bidang PJLKK dapat terpenuhi.

Bogor, Januari 2023

Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Kawasan konservasi,



Dr. Nandang Prihadi, S.Hut, M.Sc

NIP. 19691204 199503 1 001

LAMPIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

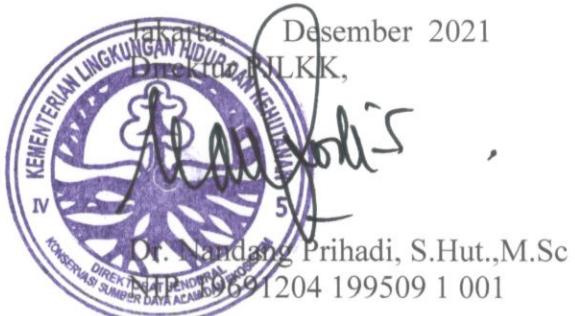
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Nandang Prihadi, S.Hut.,M.Sc

Jabatan : Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Nandang Prihadi, S.Hut.,M.Sc

Jabatan : Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Wiratno, M.Sc

Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Ir. Wiratno, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003

Jakarta, Desember 2021
Pihak Pertama,
Dr. Nandang Prihadi, S.Hut.,M.Sc
NIP. 191204 199509 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
 Unit Satuan Kerja : Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
 Tahun Anggaran : 2022

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET IKK	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (RO)	RINCIAN OUTPUT (RO)
1	Terjaminnya Efektifitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi serta Kolaborasi Pengelolaan Kawasan	1. Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas	1. 15 Destinasi 2. 9 Entitas 3. 10 Izin 4. 7 Destinasi 5. 3 Destinasi	1. 5423.ABV Kebijakan Bidang Kehutanan	001- Kebijakan Pengolaan Destinasi Wisata Alam Priotitas yang Dikembangkan 002 - Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan
		2. Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Dan Karbon 3. Jumlah Perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Minimal 4. Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education 5. Jumlah Destinasi Wisata Alam Bahari		2. 5423.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001- HLN Forest Investment Program Project I

Program/Kegiatan :

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

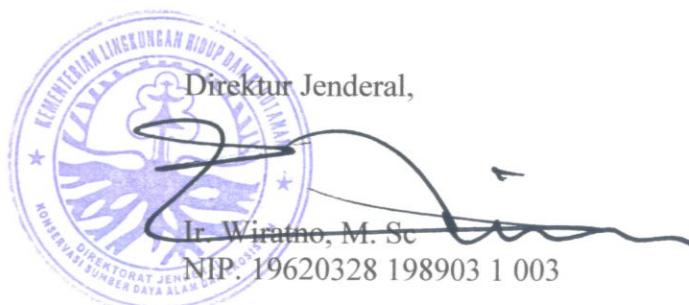
1. Kebijakan Bidang Kehutanan
2. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

Anggaran :

Rp. 3.715.556.000,-
 Rp. 399.000.000,-

Total Anggaran :

Rp. 4.114.556.000,-



RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Unit Satuan Kerja : Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
Tahun Anggaran : 2022

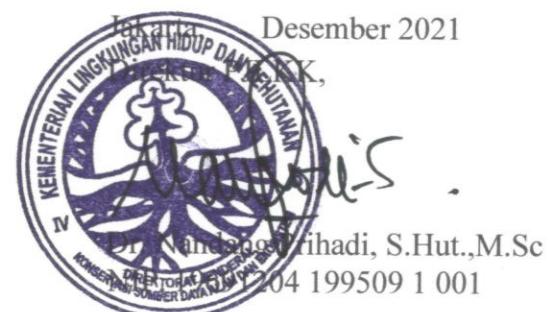
Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	B03		B06		B09		B12	
				Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan	Jumlah destinasi wisata alam prioritas	15 Destinasi	15	Destinasi	15	Destinasi	15	Destinasi	15	Destinasi
				Penjelasan Capaian:		Penjelasan Capaian:		Penjelasan Capaian:		Penjelasan Capaian:	
				1) Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi		1) Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi		1) Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi		1) Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi	
				2) Peningkatan pengelolaan jasa lingkungan wisata alam berbasis masyarakat		2) Peningkatan pengelolaan jasa lingkungan wisata alam berbasis masyarakat		2) Peningkatan pengelolaan jasa lingkungan wisata alam berbasis masyarakat		2) Peningkatan pengelolaan jasa lingkungan wisata alam berbasis masyarakat	
				3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kontrak pembangunan sarana prasarana wisata alam		3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kontrak		3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kontrak		3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kontrak	
				4) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan dan perijinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi		4) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan dan perijinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi		4) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan dan perijinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi		4) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan dan perijinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi	

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	B03		B06		B09		B12	
				Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
			9 Entitas	9	Entitas	9	Entitas	9	Entitas	9	Entitas
		Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Dan Karbon		Penjelasan Capaian: Jasa lingkungan panas bumi :Penyusunan/Penyempurnaan NSPK Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi; Fasilitasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Hutan Konservasi; Verifikasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi; Koordinasi/Sinkronisasi Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di UPT/SKPD; Supervisi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Hutan Konservasi (4 Lokasi)	Penjelasan Capaian: Jasa lingkungan panas bumi :Fasilitasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Hutan Konservasi; Verifikasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi; Koordinasi/Sinkronisasi Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di UPT/SKPD; Supervisi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Hutan Konservasi (4 Lokasi)	Penjelasan Capaian: Jasa lingkungan panas bumi :Fasilitasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Hutan Konservasi; Verifikasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi; Koordinasi/Sinkronisasi Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di UPT/SKPD; Supervisi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Hutan Konservasi (4 Lokasi)	Penjelasan Capaian: Jasa lingkungan panas bumi :Fasilitasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Hutan Konservasi; Verifikasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi; Koordinasi/Sinkronisasi Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di UPT/SKPD; Supervisi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Hutan Konservasi (4 Lokasi)	Penjelasan Capaian: Jasa lingkungan karbon: Koordinasi/ Sinkronisasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon; Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Hutan Konservasi; Inhouse Training dan Simulasi Integrasi Jasa Lingkungan ke dalam Karbon Hutan di Taman Nasional; Desiminasi Hasil Integrasi Jasa Lingkungan ke Dalam Stok karbon di Taman Nasional; 'Fasilitasi Pengembangan Pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan hutan konservasi;	Penjelasan Capaian: Jasa lingkungan karbon: Koordinasi/ Sinkronisasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon; Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Hutan Konservasi; Desiminasi Hasil Integrasi Jasa Lingkungan ke Dalam Stok karbon di Taman Nasional; Rapat-Rapat/FGD Pembahasan/Konsinyasi Integrasi Jasa Lingkungan ke Dalam Stok karbon Berbasis Ekosistem di Taman Nasional; 'Fasilitasi Pengembangan Pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan hutan konservasi;	Penjelasan Capaian: Jasa lingkungan karbon: Koordinasi/ Sinkronisasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon; Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Hutan Konservasi; Desiminasi Hasil Integrasi Jasa Lingkungan ke Dalam Stok karbon Berbasis Ekosistem di Taman Nasional; Rapat-Rapat/FGD Pembahasan/Konsinyasi Integrasi Jasa Lingkungan ke Dalam Stok karbon Berbasis Ekosistem di Taman Nasional; 'Fasilitasi Pengembangan Pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan hutan konservasi;	

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	B03		B06		B09		B12	
				Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Jumlah Perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Minimal	10 Izin	10	izin	10	izin	10	izin	10	izin
				Penjelasan Capaian: Penyusunan NSPK bidang pemanfaatan jasa lingkungan air; Verifikasi, Fasilitasi dan Pembahasan Usulan Penetapan Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air; Supervisi, Monitoring dan evaluasi;		Penjelasan Capaian: Penyusunan NSPK bidang pemanfaatan jasa lingkungan air; Sosialisasi NSPK Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air; Verifikasi, Fasilitasi dan Pembahasan Usulan Penetapan Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air; Supervisi, Monitoring dan evaluasi;		Penjelasan Capaian: Penyusunan NSPK bidang pemanfaatan jasa lingkungan air; Sosialisasi NSPK Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air; Verifikasi, Fasilitasi dan Pembahasan Usulan Penetapan Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air; Supervisi, Monitoring dan evaluasi;		Penjelasan Capaian: Sosialisasi NSPK Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air; Verifikasi, Fasilitasi dan Pembahasan Usulan Penetapan Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air; Supervisi, Monitoring dan evaluasi;	
		Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education	7 Destinasi	7	Destinasi	7	Destinasi	7	Destinasi		Destinasi
				Penjelasan Capaian: 1) Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi 2) Peningkatan pengelolaan jasa lingkungan wisata alam berbasis masyarakat 3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kontrak pembangunan sarana prasarana wisata alam 4) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan dan perijinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi		Penjelasan Capaian: 1) Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi 2) Peningkatan pengelolaan jasa lingkungan wisata alam berbasis masyarakat 3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kontrak pembangunan sarana prasarana wisata alam 4) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan dan perijinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi		Penjelasan Capaian: 1) Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi 2) Peningkatan pengelolaan jasa lingkungan wisata alam berbasis masyarakat 3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kontrak pembangunan sarana prasarana wisata alam 4) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan dan perijinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi		Penjelasan Capaian: 1) Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi 2) Peningkatan pengelolaan jasa lingkungan wisata alam berbasis masyarakat 3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kontrak pembangunan sarana prasarana wisata alam 4) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan dan perijinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi	

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	B03		B06		B09		B12	
				Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
				3	Destinasi	3	Destinasi	3	Destinasi	3	Destinasi
		Jumlah destinasi wisata alam bahr	3 Destinasi	Penjelasan Capaian:	1) Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi 2) Peningkatan pengelolaan jasa lingkungan wisata alam berbasis masyarakat 3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kontrak pembangunan sarana prasarana wisata alam 4) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan dan perijinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi	Penjelasan Capaian:	1) Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi 2) Peningkatan pengelolaan jasa lingkungan wisata alam berbasis masyarakat 3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kontrak pembangunan sarana prasarana wisata alam 4) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan dan perijinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi	Penjelasan Capaian:	1) Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi 2) Peningkatan pengelolaan jasa lingkungan wisata alam berbasis masyarakat 3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kontrak pembangunan sarana prasarana wisata alam 4) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan dan perijinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi	Penjelasan Capaian:	1) Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi 2) Peningkatan pengelolaan jasa lingkungan wisata alam berbasis masyarakat 3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kontrak pembangunan sarana prasarana wisata alam 4) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan dan perijinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi

Desember 2021



Dr. Nandang Syihadi, S.Hut.,M.Sc